



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 – 2018.

Pasal 1

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan :

- a. sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas;
- b. agar kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumber daya air serta pengembangan kelembagaan;

Pasal 3

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. sebagai dasar dalam menyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. sebagai acuan penentuan lokasi prioritas Rehabilitasi

Hutan Lahan berdasarkan Land Mapping Unit Terpilih dalam rangka memberikan rekomendasi teknis sebagai jenis kegiatan yang mungkin dilaksanakan;

- c. sebagai dasar perkiraan volume dan kebutuhan sumberdaya manusia, biaya dan sarana/prasarana fisik dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- d. sebagai dasar kerangka kerja dalam pemantauan dan evaluasi hasil maupun dampak kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pasal 4

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

06 NOV 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2014 - 2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya alam berupa hutan merupakan anugerah dan amanat tak ternilai yang diberikan Tuhan untuk kelangsungan semua makhluk ciptaannya. Karena hutanlah satu-satunya sistem alam yang efektif mengatur tata air, tata tanah dan tata udara untuk kehidupan di bumi, yang terbentuk melalui proses dan waktu yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun. Sebagai amanat, hutan seyogyanya dikelola secara arif dan terukur yang pemanfaatannya tidak melebihi daya dukung dan kemampuan pemulihan hutan itu sendiri. Demikian juga dengan sumber daya alam yang berupa tanah dan air.

Kelestarian hutan sangat tergantung dari pengelola yang memegang kendali dan tujuan pengelolaan kehutanan. Sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui, hutan bukanlah jenis sumberdaya alam yang habis sekali pakai. Akan tetapi sifat terbaharui yang terkandung di dalamnya sangat memungkinkan bagi sumberdaya hutan untuk dilaksanakan pembangunan kembali pasca eksploitasi guna mengembalikan pada kondisi seperti semula. Dengan sifat ini maka sumberdaya hutan sebagai salah satu potensi pembangunan dapat selalu di "**rebuilding**" sehingga kelestarian baik aspek fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosialnya dapat selalu dijamin.



Komponen utama Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi vegetasi, lahan dan air, dimana air berperan sebagai pengikat keterkaitan dan ketergantungan antar komponen utama DAS atau Sub DAS. Air selalu bergerak dalam satu siklus hidrologi, meliputi curah hujan, peresapan serta penguapan dan pengalirannya dalam wilayah DAS / Sub DAS. Fluktuasi debit air sebagai indikator kunci stabilitas DAS, dipengaruhi oleh kondisi vegetasi dan lahan serta erosi dan sedimentasi sebagai indikator kunci kualitas sistem DAS. Oleh karena itu hutan dan lahan sebagai kawasan penangkap air atau **catchment area** yang berfungsi menjaga tata air pada suatu DAS, harus dijaga kelestariannya.

Perlu diketahui bahwa laju *deforestasi* sumberdaya hutan di Indonesia pada tahun 2000 - 2005 sebesar 1,08 juta Ha/Tahun, di lain pihak laju rehabilitasi hanya sebesar 500.000 Ha/Tahun. Oleh karenanya masih sangat diperlukan upaya rehabilitasi agar kondisi sumber daya hutan dan lahan yang ada dapat dipertahankan sekaligus pada gilirannya nanti dapat dilestarikan, baik sebagai komoditi ekonomi maupun sebagai suatu ekosistem. Selanjutnya agar pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu perencanaan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan terdiri atas :

1. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk-RHL-DAS) dengan jangka waktu 15 tahun

✓

2. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL) dengan jangka waktu 5 tahun
3. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) dengan jangka waktu 1 tahun

Berbagai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan seperti tersebut di atas, dalam penyusunannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan RTk-RHL-DAS, Nomor P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan RP-RHL dan Nomor P.38/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan RTn-RHL. Dokumen RTk-RHL-DAS disusun untuk satu wilayah kerja Balai Pengelolaa Daerah Aliran Sungai (DAS), adapun RP-RHL dan RTn-RHL disusun untuk satu wilayah kabupaten/kota. Penyusunan dokumen RP-RHL dan RTn-RHL ini bersifat "*mandatory*" atau wajib untuk dilaksanakan, termasuk Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL) merupakan rencana manajemen (*management plan*) dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPRHL memiliki jangka waktu 5 tahun dan merupakan tindak lanjut penyusunan RTkRHL-DAS, sehingga dalam penyusunannya didasarkan kepada data RTkRHL DAS. Dokumen RPRHL paling tidak memuat tentang 1). Kebijakan dan Strategi, 2). Kelembagaan, 3). Pembiayaan, 4). Kegiatan Pendukung, 5) Tata Waktu dan 6). Monitoring dan Evaluasi.

B. Maksud, Tujuan dan Kegunaan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) adalah untuk menyediakan suatu rencana pengelolaan (*management plan*) untuk mengelola pelaksanaan kegiatan RHL yang didasarkan kepada RTkRHL DAS, strategi pengelolaan hutan dan potensi sumberdaya (tenaga, sarana prasarana dan pendanaan) pada setiap wilayah Kabupaten/Kota. Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) adalah agar rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi & sedimentasi, pengembangan sumberdaya air, dan pengembangan kelembagaan.

Selanjutnya manfaat atau kegunaan dokumen RPRHL dalam pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan adalah :

- Sebagai dasar dalam menyusun RTn-RHL dengan jangka waktu 1 tahun,
- Untuk menentukan lokasi prioritas RHL berdasarkan LMU Terpilih serta memberikan rekomendasi teknis berbagai jenis kegiatan yang mungkin untuk dilaksanakan.
- Memperkirakan volume dan kebutuhan sumberdaya (manusia, biaya dan sarana/prasarana fisik) dalam melaksanakan RHL DAS.
- Sebagai dasar dan kerangka kerja dalam memantau dan mengevaluasi hasil dan dampak kegiatan RHL pada DAS/Sub DAS yang bersangkutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) adalah :

- Kondisi Umum dan Kondisi Sumberdaya Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas
- Kebijakan dan strategi pembangunan hutan dan rehabilitasi hutan dan lahan
- Sasaran/lokasi kegiatan RHL selama 5 tahun
- Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan, Pengendalian Erosi dan Sedimentasi dan Pengembangan Sumberdaya Air
- Kelembagaan, Pembiayaan dan Tata Waktu Pelaksanaan RHL

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL) adalah :

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan,
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan RP-RHL,
- Peraturan Dirjen Bina DAS PS Nomor. P.2/V-SET/2013 tentang “Ancar – Ancar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pembangunan Bidang PDAS PS Tahun 2013

18

E. Pengertian

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang bersifat menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas adalah DAS yang berdasarkan kondisi lahan, hidrologi, sebak, investasi dan kebijaksanaan pembangunan wilayah tersebut perlu diberikan prioritas dalam penanganannya.
3. Daerah Tangkapan Air (DTA) atau *Catchment Area* adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu outlet atau tempat atau peruntukan tertentu.
4. Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucus bambu/kayu yang dibuat pada alur sungai/ jurang dengan tinggi maksimal 4 (empat) meter yang berfungsi untuk mengendalikan/mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (*run-off*).
5. Dam pengendali adalah bendungan kecil semi permanen yang dapat menampung air (tidak lolos air) dengan konstruksi urugan tanah homogen, lapisan kedap air dari beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi tanah, sedimentasi dan aliran permukaan yang

- dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi bendungan maksimal 8 (delapan) meter
6. Gully Plug/ Bangunan pengendali adalah bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit melintang alur parit dengan konstruksi batu, kayu atau bambu.
 7. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %.
 8. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
 9. Kawasan budidaya tanaman semusim adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman setahun / semusim terutama tanaman pangan.
 10. Kawasan budidaya tanaman tahunan adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan, seperti hutan produksi tetap, perkebunan, tanaman buah-buahan dan lain sebagainya.
 11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 12. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup

✓

- kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam.
13. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara vegetatif dan / atau sipil teknis) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.
 14. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan.
 15. *Land Mapping Unit* (LMU) Terpilih adalah satuan lahan terkecil pada RTk RHL DAS yang mempunyai kesamaan kondisi biofisik (kekritisan lahan, fungsi kawasan, morfologi DAS) dengan klas erosi Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis.
 16. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.
 17. Penanaman pengkayaan hutan rakyat adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada lahan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan poles 200-250 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakannya baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.

✓

18. Penghijauan lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lahan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai.
19. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
20. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat RTk-RHL DAS adalah rencana RHL 15 (lima belas) tahunan yang memuat rencana pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumberdaya air dan pengembangan kelembagaan
21. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RPRHL adalah rencana manajemen (*management plan*) dalam rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RTnRHL adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan RHL, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung
23. Rorak adalah saluran buntu yang berfungsi sebagai tampungan sementara air dari aliran permukaan untuk diresapkan ke dalam tanah

24. Saluran Pembuangan Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah saluran air yang dibuat memotong kontur dapat diperkuat dengan bangunan terjunan air dan/atau gebalan rumput.
25. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS.
26. Sumur Resapan Air adalah rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.
27. UTPRHL (UTP) adalah unit terkecil pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan atau merupakan lokasi sasaran kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di tingkat lapangan yang memuat informasi tentang kode mini DAS, bentuk pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan, morfologi DAS, fungsi kawasan dan alamat administratif.



II. KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

A. Kondisi Biofisik

Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah di bagian selatan barat (barat daya) yang terletak pada posisi strategis, yaitu berada pada persimpangan perhubungan lintas regional yaitu dari Jawa Barat (Bandung) pada lintas selatan menuju arah timur (Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya) atau sebaliknya dan dari Jawa Barat (Cirebon) pada lintas utara melewati Kota Slawi (Ibukota Kabupaten Tegal) menuju Cilacap, wilayah tengah Pegunungan Dieng dan Semarang maupun ke Yogyakarta atau sebaliknya.

1. Letak Geografis

Kabupaten Banyumas terletak pada $108^{\circ}39'17''$ – $109^{\circ}27'15''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}15'05''$ – $7^{\circ}37'10''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.326 Ha atau 24,35 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 51.921 Ha (39,11%) dan lahan bukan pertanian seluas 48.511 Ha (36,54%). Luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Banyumas Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2008 - 2011

No.	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1.	Lahan Pertanian	85.512	85.512	84.369	84.247
a.	Lahan Sawah	32.219	32.219	32.307	32.326
b.	Lahan Pertanian Bukan Sawah	53.293	53.293	52.062	51.921
2.	Lahan Bukan Pertanian	47.247	47.247	48.390	48.511
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber : Banyumas Dalam Angka 2012

Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten yaitu :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Secara administratif Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 kecamatan yang terdiri dari 301 desa dan 30 kelurahan.

2. Fisiografi, Topografi dan Kelerengan

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, zona Serayu, dan pegunungan Serayu Selatan. Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari barat laut – tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas. Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona *depresi longitudinal* memanjang dari barat - timur yang disebut zona Serayu.

19

Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

Wilayah Kabupaten Banyumas lebih dari 45% merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian Tengah dan Selatan serta membujur dari Barat ke Timur. Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25 – 100 M dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100 – 500 M dpl yaitu seluas 40.385,Ha.

Berdasarkan kemiringan wilayah, Kabupaten Banyumas mempunyai 4 (empat) kategori yaitu :

- 0° – 2° meliputi areal seluas 43.876,9 Ha atau 33,05% yaitu wilayah bagian tengah dan selatan.
- 2° - 15° meliputi areal seluas 21.294,5 Ha atau 16,04% yaitu sekitar Gunung Slamet.
- 15° - 40° meliputi areal seluas 35.141.3 Ha atau seluas 26,46% yaitu daerah lereng Gunung Slamet.
- Lebih dari 40° meliputi areal seluas 32.446,3 ha atau seluas 24,44 % yaitu daerah lereng Gunung Slamet.

Dilihat dari bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya, wilayah Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori daerah yaitu :

1. Daerah pegunungan disebelah utara atau daerah lereng Gunung Slamet dan daerah Pegunungan Serayu Selatan yang membujur hampir sepanjang wilayah kabupaten dan hanya dipisahkan oleh lembah di daerah Jatilawang.

2. Dataran rendah terletak diantara lereng Gunung Slamet dan Pegunungan Serayu Selatan dengan lebar rata-rata 15 km;
3. Dataran rendah di sebelah selatan Pegunungan Serayu Selatan, membujur dari arah barat sampai dengan perbatasan Kabupaten Kebumen dengan lebar rata-rata 10 km.

3. Iklim

Curah hujan di Kabupaten Banyumas cukup tinggi yaitu 2.725 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 26,3°C, suhu minimum sekitar 24,4°C dan suhu maksimum sekitar 30,9°C. Selama tahun 2012 di Kabupaten Banyumas terjadi hujan rata-rata pertahun sebanyak 126 hari dengan curah hujan rata-rata 3.048 mm per tahun. Kecamatan yang paling sering terjadi hujan di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Kembaran dengan 153 hari hujan dan curah hujan pertahun mencapai 434 mm selama tahun 2012, sedangkan kecamatan yang paling sedikit terjadi hujan adalah Kecamatan Somagede dengan 52 hari hujan dengan curah hujan mencapai 128 mm dan kecamatan yang paling sedikit curah hujannya adalah kecamatan Kemranjen dengan curah hujan sebesar 62 mm dengan 5 hari hujan.

4. Jenis Tanah

Menurut tingkat perkembangannya jenis tanah di wilayah Kabupaten Banyumas dibedakan atas tanah yang belum lanjut tingkat perkembangannya, seperti Alluvial, Litosol dan Regosol; serta tanah – tanah yang sudah lanjut perkembangannya yakni Latosol, Andosol dan Mediteran. Alluvial pada umumnya menyebar di daerah dataran rendah,

yaitu wilayah selatan Kabupaten Banyumas, Litosol merupakan tanah yang umumnya terdapat di lereng – lereng atau kaki bukit yang umumnya mempunyai ciri solum dangkal, adapun jenis tanah Regosol menempati perbukitan dan terbentuk dari endapan pasir dan batuan vulkanik intermedier sampai basin. Sifat tanah Regosol adalah tekstur kasar, drainase cepat, sifat fisik tanah sedang, permeabilitas agak cepat, peka terhadap erosi dan kesuburan tanah sedang. Jenis Tanah Andosol tersebar di sekitar Gunung Slamet. Jenis tanah ini memiliki erosivitas tinggi, asam, tekstur kasar, drainase cepat – sedang, terbentuk dari abu/pasir vulkanik intermedier sampai basin.

Tanah Regosol merupakan tanah yang mempunyai sifat fisik kasar (berpasir). Tanah Litosol dan Regosol umumnya merupakan tanah yang relatif kurang subur. Sedangkan tanah lainnya seperti Alluvial, Latosol, Mediteran dan Andosol relatif lebih subur dibandingkan dengan Litosol dan Regosol.

5. Penggunaan Lahan

Luas Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha tersebut, yang merupakan lahan sawah sekitar 32.307 Ha atau sekitar 24.27 % dari wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitar 10.448 Ha sawah dengan pengairan teknis. Sedangkan yang 75,73% atau sekitar 100.452 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 17.504 Ha atau 18,72% merupakan tanah untuk bangunan dan pekarangan dan sisanya adalah lahan kering berupa kawasan hutan negara, tegalan, hutan rakyat,

kebun, dan areal penggunaan lain. Rincian penggunaan lahan di Kabupaten Banyumas dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Penggunaan lahan di Kabupaten Banyumas

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
I	Lahan Sawah	32.326
1	Pengairan Teknis	10.551
2	Pengairan Setengah Teknis	5.032
3	Pengairan Sederhana PU	7.179
4	Pengairan Non PU	3.227
5	Tadah Hujan	6.337
6	Pasang Surut	-
7	Tanah Sawah Lebak, Polder dll	-
8	Tanah Sawah yang sementara tidak diusahakan	-
II	Lahan Pertanian Bukan Sawah	50.169
1	Tegal/Kebun	24.314
2	Ladang/Huma	2.430
3	Perkebunan	9.676
4	Ditanami pohon/Hutan rakyat	8.769
5	Tambak	653
6	Kolam/tebat/E,pang	340
7	Padang Penggembalaan/rumput	46
8	Sementara tidak diusahakan	-
9	Lainnya (pekarangan yang ditanami pertanian, dll)	3.941
III	Lahan Bukan Pertanian	50.263
1	Rumah, Bangunan dan halaman sekitarnya	17.668
2	Hutan Negara	28.662
3	Rawa – Rawa (tidak ditanami)	3
4	Lainnya (jalan, sungai , danau, lahan tandus, dll)	3.930
IV	Total	132.759

Sumber :Banyumas Dalam Angka 2012

6. Pemanfaatan Hutan dan Perkebunan

Kabupaten Banyumas memiliki luas kawasan hutan negara sebesar 28.662,06 ha yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Dalam pengelolaannya hutan negara tersebut di bagi dalam

✓

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang terdiri dari KPH Banyumas Barat seluas 7.697,15 ha, KPH Banyumas Timur seluas 18.059,47 ha (di dalamnya terdapat hutan lindung seluas 9.007,1 ha yang berada di Gunung Slamet dan sekitarnya) dan KPH Kedu Selatan Seluas 2.905,44 ha.

Disamping kawasan hutan negara, Kabupaten Banyumas juga memiliki lahan kering di luar kawasan hutan yang diperuntukan untuk budidaya tanaman perkebunan dan tanaman keras/kayu – kayuan yang meliputi; Perkebunan Besar PTPN IX seluas 1.350 ha, Perkebunan Swasta (Kakao) seluas 717.50 ha, Kebun Rakyat seluas 9.749 ha dan Hutan Rakyat seluas 12.353 ha. Apabila luas hutan negara di tambahkan dengan hutan rakyat maka akan diperoleh luasan penutupan hutan sebesar 41.001 ha atau sebesar 30,88 %. Angka ini sudah memenuhi batas minimal luasan penutupan hutan dalam suatu wilayah yaitu 30%, seperti yang diamanatkan dalam Undang – Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hutan Rakyat atau Hutan Milik/Hak di Kabupaten Banyumas tidaklah statis dalam hal luasan maupun sebarannya. Kondisi Hutan rakyat di daerah manapun pasti akan mengalami dinamika perubahan sesuai dengan kondisi permintaan akan kayu rakyat, kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap upaya rehabilitasi hutan dan lahan dan faktor lainnya.

Hutan Rakyat/Hutan Hak di Kabupaten Banyumas merupakan kawasan budidaya yang menjadi sasaran utama dalam penyusunan Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL), disamping kawasan lindung di luar

✓

kawasan hutan. Kawasan Lindung pada dasarnya merupakan lahan kering yang bukan merupakan kawasan hutan negara namun memiliki kondisi biofisik seperti hutan lindung yang dalam pengelolaannya harus diutamakan untuk fungsi perlindungan. Adapun kawasan budidaya pada dasarnya merupakan lahan kering yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya segala jenis tanaman/komoditas, baik itu tanaman keras/kayu-kayuan, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan lain sebagainya.

7. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sumberdaya Air

Kabupaten Banyumas memiliki 4 Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Ijo, DAS Serayu, DAS Tipar dan DAS Citanduy. DAS Serayu merupakan DAS yang paling luas di Kabupaten Banyumas. Berikut ini pembagian wilayah DAS di Kabupaten Banyumas seperti terlihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pembagian Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Banyumas

No	DAS/Sub DAS	Luas (ha)
I	DAS IJO	17.705
1	Sub DAS Gatel	10.485
2	Sub DAS Jambe	358
3	Sub DAS Pucung	62
4	Sub DAS Tambak	6.800
II	DAS SERAYU	105.715
1	Sub DAS Gume Piasa	2.796
2	Sub DAS Kejawen	8.066
3	Sub DAS Klawing	18.266
4	Sub DAS Logawa	26.501
5	Sub DAS Serayu Hilir	5.335
6	Sub DAS SerayuTengah	361
7	Sub DAS Tajum	44.430
III	DAS TIPAR	5.455
1	Sub DAS Tipar Hilir	354
2	Sub DAS Tipar Hulu	5.101

No	DAS/Sub DAS	Luas (ha)
IV	DAS CITANDUY	3.879
	Total	132,759

Sumber : Dinpertenbunhut, 2010

Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit sekitar 45.456.342 m³/hari atau 16.364.283.120 m³/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Tajum, Kranji, Pelus, Banjaran, Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya, sedangkan air permukaan yang berasal dari berbagai sumber mata air mempunyai debit sekitar 974.462 liter/ detik/tahun.

Potensi sumber daya air di Kabupaten Banyumas antara lain air baku dari mata air sebanyak 383 buah, dan air permukaan berupa air sungai. Jumlah embung di Kabupaten Banyumas sebanyak 10 buah, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air, khususnya di daerah-daerah kering. Guna mencukupi kebutuhan air untuk pertanian, terdapat jaringan irigasi sepanjang 620,93 km. Kondisi jaringan irigasi baik sepanjang 317,38 km, dan jaringan irigasi dalam kondisi rusak sepanjang 303,55 km. Kondisi saluran drainase di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 dengan saluran tanah masih cukup besar yaitu sepanjang 962,18 km atau sebesar 72,97% dan saluran dengan pasangan masih rendah yaitu sepanjang 356,39 km atau 27,03%, sedangkan kondisi dengan tidak ada saluran juga masih cukup besar yaitu sepanjang 1.321,22 km.

8. Kondisi Lahan Kritis

Data lahan kritis Kabupaten Banyumas yang disusun oleh BPDAS Serayu Opak Progo tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.4.

✓

Tabel 2.4. Luasan lahan kritis di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Kawasan Budidaya (hektar)		Kawasan Lindung di Luar Hutan Negara (hektar)	
		Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)
1	AJIBARANG	568,93	81,47	1.360,41	160,69
2	BANYUMAS	967,15	-	116,48	-
3	BATURADEN	115,10	-	544,13	50,62
4	CILONGOK	197,50	-	872,66	-
5	GUMELAR	1.585,94	310,72	2.797,53	992,50
6	JATILAWANG	79,73	37,42	577,41	-
7	KALIBAGOR	-	-	906,62	-
8	KARANGLEWAS	-	216,32	258,16	-
9	KEBASEN	152,67	-	60,15	-
10	KEDUNGBANTENG	46,19	-	189,86	78,60
11	KEMBARAN	-	-	-	-
12	KEMRANJEN	619,79	21,38	57,58	-
13	LUMBIR	662,04	401,40	1.668,81	1.878,55
14	PATIKRAJA	-	-	64,17	-
15	PEKUNCEN	333,39	43,01	1.448,56	-
16	PURWOJATI	371,38	-	858,59	-
17	PURWOKERTO BARAT	-	-	-	-
18	PURWOKERTO SELATAN	17,42	-	-	-
19	PURWOKERTO TIMUR	-	-	-	-
20	PURWOKERTO UTARA	-	-	-	-
21	RAWALO	183,66	-	104,20	-
22	SOKARAJA	-	-	-	-
23	SOMAGEDE	44,92	-	359,30	-
24	SUMBANG	181,34	-	181,10	-
25	SUMPIUH	379,70	19,70	60,84	-
26	TAMBAK	409,75	-	-	-
27	WANGON	257,09	31,44	2.002,61	55,10
	Jumlah	7.173,69	1.162,86	14.489,17	3.216,06
	Jumlah Total	26.041,78			

Sumber : BPDAS SOP, 2013

9. Transportasi, Aksesibilitas dan Pemukiman

Kabupaten Banyumas memiliki panjang jalan 804,78 km, dengan kondisi jalan baik tahun 2012 sepanjang 410,25 km. Kondisi jalan ini

✓

meningkat dari tahun sebelumnya, dengan kondisi jalan baik pada tahun 2011 sepanjang 273,84 km. Panjang jalan kondisi sedang mengalami penurunan, pada tahun 2011 kondisi jalan sedang sepanjang 248,64 km, menurun menjadi 214,92 km pada tahun 2012. Kondisi jalan rusak di Kabupaten Banyumas juga menurun dari tahun 2011 sepanjang 282,30 km menjadi 179,61 km pada tahun 2012.

Kondisi perumahan dan permukiman di Kabupaten Banyumas tahun 2012 menunjukkan perkembangan yang membaik. Berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya perkembangan perubahan fisik perumahan milik masyarakat antara lain berupa kecenderungan meningkatnya persentase jenis rumah layak huni semakin meningkat. Data perumahan dan pemukiman pada tahun 2012 (*Sumber : Dinas CKKTR Kab. Banyumas Th. 2012*) sebanyak 437.564 buah yang terdiri dari Jenis gedung sebanyak 196.405 buah, sebagian gedung sebanyak 90.616 buah, kayu sebanyak 84.766 buah dan bambu 65.777 buah. Sedangkan jumlah rumah layak huni sebanyak 384.492 (87,87%) dan rumah tidak layak huni sebanyak 53.072 (12,13%).

10. Produk Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Banyumas. Perekonomian Kabupaten Banyumas juga masih didukung oleh sektor pertanian yang pada tahun 2011 menyumbangkan 21,57 persen dari PDRB Kabupaten Banyumas (*Banyumas Dalam Angka Tahun 2012*). Sebagai sektor yang

mendukung ketahanan pangan perkembangan sektor pertanian selama 5 tahun mengalami produksi yang fluktuatif selama tahun 2007-2011.

Komoditas utama sub sektor pertanian tanaman pangan adalah padi, jagung dan kedelai. Produksi padi selama 5 tahun mengalami naik turun, dimana produksi padi pada tahun 2007 mencapai 314.613 ton, tahun 2008 produksi padi mencapai 337.366 ton, untuk produksi padi tahun 2009 sebesar 355.048 ton, pada tahun 2010 sebesar 389.044 ton, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 336.197 ton. Produksi jagung selama 5 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2007 produksi jagung sebesar 20.571 ton, tahun 2008 sebesar 17.734 ton, pada tahun 2009 sebesar 17.478 ton dan tahun 2010 produksi jagung mengalami penurunan 14.208 ton, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 22.931 ton.

Untuk sub sektor peternakan hampir seluruh jenis ternak mengalami produktifitas yang fluktuatif, seperti sapi potong pada tahun 2008 populasinya mencapai 16.774 ekor, tahun 2009 17.190 ekor, tahun 2010 sebanyak 19.220 ekor, tahun 2011 sebanyak 17.832 ekor pada tahun 2012 sebanyak 18.631 ekor atau mengalami kenaikan sebesar 4,29% dari tahun sebelumnya. Perkembangan ternak Kambing pada tahun 2011 sebanyak 200.186 ekor dan pada tahun 2012 ekor atau mengalami kenaikan sebesar 1,71%.

Hasil Perkebunan yang diproduksi pada tahun 2012 dan merupakan komoditas unggulan adalah komoditas kelapa (dalam menghasilkan kopra) dengan produksi 6.328,47 ton, komoditas kelapa

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Tahun 2008 - 2011

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1.	Laki-laki	790.680	797.715	777.568	793.194
2.	Perempuan	791.939	798.230	776.334	784.935
3.	Total	1.582.619	1.595.945	1.553.902	1.578.129
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	13.326 0,842%	(42.043) (2,63%)	25.224 1,60%

Sumber : Banyumas Dalam Angka, 2012

Adanya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2010 salah satunya adalah disebabkan adanya Sensus penduduk pada tahun tersebut dimana metode perhitungan yang digunakan berbeda dengan metode sebelumnya sehingga terdapat perbedaan dalam hasil perhitungannya. Selanjutnya kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kab. Banyumas Tahun 2011

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1.	Lumbir	102,66	43.986	428
2.	Wangon	60,78	74.157	1.220
3.	Jatilawang	48,16	57.916	1.203
4.	Rawalo	49,64	45.956	926
5.	Kebasen	54,00	56.594	1.048
6.	Kemranjen	60,71	63.333	1.043
7.	Sumpluh	60,01	50.547	842
8.	Tambak	52,03	42.550	818
9.	Somagede	40,11	32.309	806
10.	Kalibagor	35,73	46.655	1.306
11.	Banyumas	38,09	46.309	1.216
12.	Patikraja	43,23	51.122	1.183
13.	Purwojati	37,86	31.271	826
14.	Ajibarang	66,5	91.266	1.372
15.	Gumelar	93,95	45.842	488
16.	Pekuncen	92,7	65.399	705
17.	Cilongok	105,34	110.509	1.049
18.	Karanglewas	32,5	58.066	1.787
19.	Kedungbanteng	60,22	51.898	862

deres menghasilkan gula merah dengan produksi 25.620,59 ton. Sementara komoditas yang lain seperti cengkeh, teh, kopi, karet, lada, pala, tembakau, kencur, temulawak, coklat/kakao dan vanili relatif kecil produksinya. Hutan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan Hutan Rakyat di luar kawasan hutan negara. Produksi hasil hutan meliputi kayu bulat, kayu olahan, rotan maupun damar.

B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2011 mencapai 1.578.129 jiwa yang terdiri dari 793.194 laki-laki dan 784.935 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Cilongok yang mencapai 110.509 jiwa, terdiri dari 56.008 laki-laki dan 54.501 perempuan. Sementara itu Kecamatan Purwojati merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 31.271 jiwa, terdiri dari 15.664 laki-laki dan 15.607 perempuan.

Permasalahan di bidang kependudukan terkait dengan sebarannya adalah tidak meratanya jumlah dan kepadatan penduduk pada berbagai kecamatan. Ketidakmerataan jumlah dan kepadatan ini terjadi secara signifikan dengan konsekuensi beban pembangunan SDM pada berbagai wilayah sangat berbeda. Selain itu laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas juga relatif tinggi. Berikut jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.5. dibawah ini :

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
20.	Baturaden	45,53	47.867	1.051
21.	Sumbang	53,42	75.772	1.418
22.	Kembaran	25,92	73.244	2.826
23.	Sokaraja	29,92	78.071	2.609
24.	Purwokerto Selatan	13,75	71.588	5.206
25.	Purwokerto Barat	7,4	49.825	6.733
26.	Purwokerto Timur	8,42	57.975	6.885
27.	Purwokerto Utara	9,01	58.102	6.449
Total		1.327,59	1.578.129	1.189

Sumber : Banyumas Dalam Angka, 2012.

Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2011 mencapai 1.189 jiwa/km². Kecamatan Purwokerto Timur merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Banyumas, yaitu sebanyak 6.885 jiwa/km². Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Lumbir dengan kepadatan 428 jiwa/km².

Pada tahun 2008 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 1.138.525 jiwa, tahun 2009 sebanyak 1.145.444 jiwa, pada tahun 2010 sebanyak 1.138.747 jiwa, dan pada tahun 2011 sebanyak 1.141.061. Dari penduduk usia kerja tersebut dapat diketahui jumlah angkatan kerja dan jumlah angkatan kerja yang bekerja tiap tahun. Pada tahun 2008 jumlah angkatan kerja sebanyak 715.841 orang, angkatan kerja yang bekerja sebanyak 658.221 orang, tahun 2009 sebanyak 740.042 orang , yang bekerja sebanyak 680.460 orang, pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja sebanyak 792.012 jiwa dan yang bekerja sebanyak 733.609 orang, sedangkan pada tahun 2011 angkatan kerja sebanyak 800.633 , dan yang bekerja 761.034 orang.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2008-2011 mengalami peningkatan dari sebesar



62,99% pada tahun 2008 menjadi 70,71% pada tahun 2011. Dilihat dari jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan berdasarkan data BPS, dapat diketahui selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 rata-rata pencari kerja sebanyak 58.535 orang. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari sebanyak 8,05% pada tahun 2008 menjadi 4,95% pada tahun 2011.

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat dari jumlah Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL). Rata-rata jumlah AKAN selama 4 tahun terakhir (2008-2011) sejumlah 1.999 orang per tahun, 732 orang per tahun untuk AKAD dan 1.485 orang untuk AKL.

2. Ekonomi dan Kesejahteraan Penduduk

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2008-2012 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. Beberapa indikator kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 Kabupaten Banyumas tahun 2008 sampai dengan 2012 memiliki tren yang positif. Perkembangan

PDRB ADHB dan PDRB ADHK tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut :

Tabel 2.7. PDRB Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2012 (dalam ribuan)

No.	Variabel	2008	2009	2010	2011	2012
1.	PDRB ADHB	8.347.681.698	9.189.718.165	10.335.939.041	11.492.803.624	12.768.631.813
2.	PDRB ADHK	4.171.468.946	4.400.542.230	4.654.634.020	4.927.351.427	5.221.519.494

Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2012.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp. 8.347.681.698,00 ribu rupiah, meningkat menjadi sebesar Rp. 12.768.631.813,00 ribu rupiah pada tahun 2012. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari sebesar Rp. 4.171.468.946,00 ribu rupiah pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 5.221.519.494,00 ribu rupiah pada tahun 2012.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2008-2012 cenderung meningkat, tahun 2008 sebesar 5,38 menjadi 5,97 pada tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas berkembang dengan baik, hanya saja kondisi tersebut masih dibawah capaian Jawa Tengah dan Nasional. Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara sektoral. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 mencapai 5,97 %, meningkat sekitar 0,11 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 5,86 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8. dibawah ini :

✓

Tabel 2.8. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Kabupaten Banyumas
Tahun 2008-2012 (persen)

No.	Sektor	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian	5,15	4,89	3,71	1,64	5,27
2.	Penggalian	4,68	5,12	6,91	4,92	6,53
3.	Industri Pengolahan	3,33	3,04	4,41	6,52	6,67
4.	Listrik dan Air Bersih	4,39	6,36	8,67	4,73	5,67
5.	Konstruksi	5,38	6,60	5,87	6,21	5,58
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,69	5,19	7,10	7,15	7,16
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,95	4,60	6,27	8,23	7,21
8.	Keuangan, persewaan dan Jasa	5,96	8,01	6,05	6,66	5,71
9.	Jasa-jasa	6,9	7,56	7,69	7,27	4,62
	PDRB	5,38	5,49	5,77	5,86	5,97

Sumber : Banyumas Dalam Angka, 2012

Pertumbuhan PDRB sektoral yang terbesar Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 7,21 %. Kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,16 %.

b. PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita menunjukkan trend yang positif dalam kurun waktu tahun 2008-2012. Pada tahun 2012, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.965.276,00 sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2012 sebesar Rp. 3.257.267,00. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Banyumas masih didominasi dari sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan sebagai 3 sektor utama penyumbang PDRB. PDRB per kapita yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan masyarakat Kabupaten Banyumas semakin meningkat dari segi kesejahteraannya. Perkembangan PDRB Per Kapita selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.9. berikut :

✓

Tabel 2.9. PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB (Rupiah) Tahun 2008-2012

No.	Variabel	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	PDRB Per Kapita ADHK 2000	2.774.945	2.914.070	2.994.245	3.137.313	3.257.267
2.	PDRB Per Kapita ADHB	5.553.045	6.085.495	6.648.929	7.318.902	7.965.276

Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2012

c. Laju Inflasi

Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2008-2012 menunjukkan cenderung berfluktuasi dengan trend mengalami penurunan, dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perbandingan laju inflasi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel 2.10. berikut :

Tabel 2.10. Laju Inflasi Tahun 2008-2012

No.	Laju Inflasi (%)	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kabupaten Banyumas	12,06	2,83	6,04	3.40	4.73
2.	Provinsi Jawa Tengah	9,55	3,32	6,88	2.68	4.24
3.	Nasional	11,06	2,78	6,96	3.79	4.30

Sumber : Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2012

Laju inflasi mencapai angka tertinggi pada tahun 2008, hal ini karena dipengaruhi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang tentunya berdampak terhadap perubahan harga-harga berbagai barang dan jasa. Selanjutnya setelah tahun 2008 perubahan harga barang dan jasa di Kabupaten Banyumas relatif stabil, hal ini

ditunjukkan oleh tingkat laju inflasi yang dibawah 7%, yaitu berturut-turut dari tahun 2009 sampai dengan 2012 sebesar 2,83%, 6,04%, 3,40% dan 4,73%. Inflasi yang terjadi tahun 2011 dan tahun 2012 di Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari Inflasi di Jawa Tengah sebesar 2.68% dan 4,24% dan Inflasi Nasional sebesar 3.79% dan 4,3%.

Inflasi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,33% menjadi 4,73% sejalan dengan trend peningkatan inflasi nasional. Kenaikan tersebut masih tergolong wajar karena mengindikasikan adanya penguatan aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi permintaan, meningkatnya daya beli masyarakat memicu peningkatan tingkat konsumsi rumah tangga sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2012. Dari sisi penawaran, penundaan kenaikan BBM bersubsidi dan terjaganya pasokan pangan memberi kontribusi cukup signifikan dalam menahan laju inflasi. Meskipun kenaikan BBM bersubsidi baru terjadi pada tahun 2013, namun telah memicu ekspektasi pelaku usaha yang berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas secara umum pada tahun 2012. Semakin membaiknya produksi dan distribusi komoditas pangan khususnya beras sangat berpengaruh dalam menjaga inflasi pada tingkat yang wajar.

d. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami penurunan dari 22,93 % pada tahun 2008 (data bulan Juli) menjadi 21,52% pada tahun 2009 (data bulan Juli) dan 20,20 % pada tahun 2010 (data bulan Juli). Namun pada tahun 2011

(hasil PPLS 2011) tingkat kemiskinan Kabupaten Banyumas sedikit mengalami kenaikan menjadi sebesar 21,11%.

Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel 2.11. berikut :

Tabel 2.11. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008-2011

No.	Persentase Penduduk Miskin	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1.	Kabupaten Banyumas	22,93	21,52	20,20	21,11
2.	Provinsi Jawa Tengah	19,23	17,72	16,56	16,21
3.	Nasional	15,42	14,15	13,33	12,36

Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2012

Meskipun Selama 4 tahun terakhir (2008-2011) tingkat kemiskinan Kabupaten Banyumas cenderung mengalami penurunan, namun jika dilihat dari tingkat kemiskinan tahun 2011 sebesar 21,11%, Kabupaten Banyumas posisinya masih berada di atas angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,21%.

3. Budaya dan Agama

Pada prinsipnya kebudayaan Banyumas merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa. Namun dikarenakan kondisi dan letak geografis yang jauh dari pusat kekuasaan kerajaan (keraton), budaya Banyumas sangat dijiwai oleh semangat kerakyatan. Kebudayaan Banyumas berlangsung dalam pola kesederhanaan, yang dilandasi semangat kerakyatan, “cablaka” (*transparancy*), *explosure* (terbuka) dan dibangun dari kehidupan masyarakat yang berpola kehidupan tradisional-agraris. Kecenderungan demikian karena disebabkan wilayah Banyumas merupakan wilayah pinggiran dari kerajaan-kerajaan besar (Jogyakarta,



Surakarta). Hal demikian mengakibatkan perkembangan kebudayaannya secara umum berlangsung lebih lambat dibanding dengan kebudayaan keraton.

Bagi masyarakat Banyumas, bahasa *Bayumasan* merupakan bahasa ibu yang hadir sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Hal ini seperti yang dikatakan Koentjaraningrat, orang Jawa memiliki pandangan yang sudah pasti mengenai kebudayaan Banyumas selain memiliki bentuk-bentuk organisasi sosial kuno yang khas, juga memiliki logat Banyumas yang berbeda. Di Banyumas, bahasa *Banyumasan* memiliki ciri-ciri khusus. Bahasa *Banyumasan* dapat dibedakan dengan bahasa Jawa umum/*lumrah*, antara lain: (1) berkembang secara lokal hanya di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas, (2) memiliki karakter lugu dan terbuka, (3) tidak terdapat banyak gradasi, (4) digunakan sebagai bahasa ibu oleh sebagian besar masyarakat Banyumas, (5) mendapat pengaruh dari bahasa Jawa kuno, Jawa tengahan, dan Sunda, (6) pengucapan konsonan di akhir kata diucapkan/dibaca dengan jelas, tidak jarang dikatakan *ngapak-ngapak*, (7) pengucapan vokal a, i, u, e, o dibaca dengan jelas.

Dilihat dari penduduknya, Kabupaten Banyumas mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinannya. Pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Banyumas pada saat ini tercermin pada terbentuknya rasa toleransi yang tinggi antar pemeluk agama. Kerukunan dan keharmonisan bermasyarakat antar pemeluk agama ditunjukkan dengan tersebarinya tempat-tempat ibadah di Kabupaten Banyumas. Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama,

berkembangnya pondok pesantren dan meningkatnya jumlah jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Banyumas. Penduduk menurut pemeluk agama berdasarkan hasil data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2012 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Banyumas mayoritas beragama Islam sebanyak 1.891.249 orang dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 7.153 tempat. Urutan kedua adalah pemeluk agama Kristen sebesar 18.728 orang. Selanjutnya berturut turut adalah agama Katolik dengan jumlah pemeluk 12.998 orang, Budha 2.391 orang dan Hindu 478 orang. Sedangkan pemeluk agama Konghucu yang tercatat di Kabupaten Banyumas, pada tahun 2012 sebanyak 2.586 orang, kepercayaan 96 orang.

C. Kegiatan RHL yang Pernah Dilaksanakan

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang pernah dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir (2010, 2011 dan 2012) diantaranya adalah “

- Kebun Bibit Rakyat
- RHL Kawasan Lindung
- RHL DAK Bidang Kehutanan
- Penghijauan Lingkungan
- BLM-PPMPBK

Luasan total kegiatan RHL yang telah dilaksanakan mulai tahun 2010 – 2012 dan rencana RHL tahun 2013 adalah $\pm$ 18.209 hektar (belum termasuk penghijauan lingkungan yang dilaksanakan di ruang terbuka hijau/sarana umum maupun di sekitar pemukiman/halaman rumah). Pelaksanaan RHL di Kabupaten Banyumas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.12. –

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)
B.	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air		
1.	Dam Penahan (DPn)	5 Unit	1. Kemawi/ Somagede 2. Bogangin/Sumpiuh (2 unit) 3. Piasa Kulon/Somagede 4. Karangasalam/Kemranjen
2.	Gully Plug (GP)	10 Unit	1. Piasa Kulon/ Somagede 2. Karangasalam/Kemranjen 3. Bogangin/Sumpiuh (2 unit) 4. Sokawera/Somagede 5. Somagede/ Somagede 6. Kemawi /Somagede 7. Tanggeran/ Somagede (2 unit) 8. Petarangan/Kemranjen

Sumber : Laporan DAK Kab Banyumas Tahun 2010

Tabel 2.13. Pelaksanaan RHL Tahun 2011

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)
A	Vegetatif		
1.	Hutan Rakyat	300 ha	1. Piasa kulon/Somagede 2. Sokawera/Somagede 3. Somagede/Somagede 4. Ketanda/Sumpiuh 5. Gumelar Kidul/Tambak 6. Cirahab/Lumbir 7. Canduk/Lumbir
2.	Penghijauan Ligkungan	17.864 batang	Desa – Desa di wilayah Kabupaten Banyumas
3.	Pemeliharaan Tanaman	500 ha	1. Piasa kulon/Somagede 2. Sokawera/Somagede 3. Tangerang/Somagede 4. Klinting/Somagede 5. Karangasalam/Kemranjen 6. Petarangan/Kemranjen 7. Kanding/Somagede 8. Somagede/Somagede 9. Kemawi/Somagede 10. Bogangin/Sumpiuh 11. Selanegara/Sumpiuh 12. Canduk/Lumbir 13. Cirahab/Lumbir
4.	Kebun Bibit Rakyat	25 Kelompok Setara denga luasan = 25 X 125 ha = 3.125 ha	1. Klinting/Somagede 2. Kalisalak/Kedungbanteng 3. Kebarongan/Kemranjen 4. Selanegara/Sumpiuh 5. Kracak/Ajibarang 6. Karangandep/Patikraja

2.14. Adapun rencana RHL untuk tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.12. Pelaksanaan RHL Tahun 2010

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)
A	Vegetatif		
1.	Hutan Rakyat	500 ha	1. Piasa Kulon/ Somagede 2. Sokawera/ Somagede 3. Tanggeran/ Somagede 4. Klinting/ Somagede 5. Karangasam/ Kemranjen 6. Petarangan/ Kemranjen 7. Kanding/ Somagede 8. Somagede/ Somagede 9. Kemawi/ Somagede 10. Bogangin/ Sumpiuh 11. Selanegara/ Sumpiuh 12. Canduk/ Lumbir 13. Cirahab/ Lumbir
2.	RHL Kawasan Lindung	400 ha	1. Cidora/ Lumbir 2. Besuki/ Lumbir 3. Parungkamal/ Lumbir 4. Samudra/ Gumelar 5. Cibangkong/ Pekuncen 6. Cihonje/ Gumelar 7. Kedungurang / Gumelar
3.	Kebun Bibit Rakyat	27 Kelompok Setara denga luasan = $27 \times$ $125 \text{ ha} = 3.375$ ha	1. Darmakradenan/ Ajibarang 2. Tipar Kidul/ Ajibarang 3. Pasinggangan/ Banyumas 4. Binangun/ Banyumas 5. Ketenger/ Baturaden 6. Paningkaban/ Gumelar 7. Gancang/ Gumelar 8. Karangkemojing/ Gumelar 9. Tlaga/ Gumelar 10. Cilangkap/ Gumelar 11. Pekuncen/ Jatilawang 12. Karangsari/ kebasen 13. Tumiyang/ Kebasen 14. Windujaya/ Kedungbanteng 15. Baseh/ Kedungbanteng 16. Melung/ Kedungbanteng 17. Cingebul/ Lumbir 18. Karangkemiri/ Pekuncen 19. Semedo/ Pekuncen 20. Cibangkong/ Pekuncen 21. Kalitapen/ Purwojati 22. Tambaknegara/ Rawalo 23. Somagede/ Somagede 24. Somakaton/ Somakaton 25. Limpakuwus/ Sumbang 26. Watuagung/ Tambak 27. Pengadekan/ Wangon

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)
			7. Lumbir/Lumbir 8. Kaliwedi/Kebasen 9. Sawangan/Ajibarang 10. Sunyalangu/Karanglewas 11. Petahunan/Pekuncen 12. Notog/Patikraja 13. Parungkamal/Lumbir 14. Karangsalam/Kemranjen 15. Klapasawit/Purwojati 16. Karangtengah/Cilongok 17. Tanggeran/Somagede 18. Kemawi/Somagede 19. Kanding/Somagede 20. Samudra/Gumelar 21. Cikakak/Wangon 22. Cihonje/Gumelar 23. Karangrau/Banyumas 24. Kalisalak/Kebasen 25. Dermaji /Lumbir
B.	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air		
1.	Dam Penahan (DPn)	4 Unit	1. Piasa kulon/Somagede 2. Kanding/Somagede 3. Somagede/Somagede 4. Tanggeran/Somagede
2.	Gully Plug (GP)	8 Unit	1. Piasa kulon/Somagede 2. Somagede/Somagede 3. Tanggeran/Somagede 4. Klinting/Somagede 5. Sokawera/Somagede 6. Selanenegara/Sumpiuh

Sumber : Laporan DAK Kab Banyumas Tahun 2011

Tabel 2.14. Pelaksanaan Tahun 2012

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)
A	Vegetatif		
1.	Pembuatan Hutan Rakyat Intensif	200 ha	1. Piasa Kulon/Somagede 2. Kanding/Somagede 3. Tanggeran/Somagede 4. Karangsalam/Kemranjen
2.	Pembuatan Hutan Rakyat	225 ha	1. Kemawi/Somagede 2. Cibangkong/Pekuncen 3. Pengadegan/Wangon 4. Klinting/Somagede
3.	Penghijauan Ligkungan	28.498 batang	Desa – Desa di wilayah Kabupaten Banyumas
4.	Kebun Bibit Rakyat	38 kelompok Setara denga luasan = 38 X 125 ha = 4.750 ha	1. Gandatapa/Sumbang 2. Karangturi/Sumbang 3. Pekuncen/Pekuncen 4. Sikapat/Sumbang 5. Krajan/Pekuncen 6. Kutaliman/Kedungbanteng



No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)
			7. Jatisaba/Cilongok 8. Kedunggede/Lumbir 9. Sidomulih/Rawalo 10. Sambiroto/Cilongok 11. Glempang/Pekuncen 12. Kaliori/Kalibagor 13. Tumiyang/Pekuncen 14. Tunjung/Jatilawang 15. Karanggintung/Kemranjen 16. Kalisube/Banyumas 17. Kebanggan/Sumbang 18. Kedungurang/Gumelar 19. Karanglewas/Jatilawang 20. Pageraji/Cilongok 21. Tamansari/Karanglewas 22. Kaliurip/Purwojati 23. Panusupan/Cilongok 24. Sanggreman/Rawalo 25. Karangbawang/Ajibarang 26. Gumelar/Gumelar 27. Purwojati/Purwojati 28. Ketanda/Sumpiuh 29. Gunungwetan/Jatilawang 30. Jinkang/Ajibarang 31. Kalikesur/Kedungbanteng 32. Pageralang/Kemranjen 33. Kecila/Kemranjen 34. Ciberem/Sumbang 35. Kaliputih/Purwojati 36. Gunung Lurah/Cilongok 37. Banjarsari/Sumbang 38. Kotayasa / Sumbang
B.	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air		
1.	Dam Penahan (DPn)	4 Unit	1. Kanding/Somagede 2. Tanggeran/Somagede 3. Karangsalam/Kemranjen 4. Bogangin/Sumpiuh
2.	Gully Plug (GP)	8 Unit	1. Piasa kulon/Somagede 2. Kemawi/Somagede 3. Kanding/Somagede 4. Sokawera/Somagede 5. Tanggeran/Somagede 6. Karangsalam/Kemranjen 7. Kebagoran/Kemranjen 8. Bogangin/Sumpiuh

Sumber : Laporan DAK Kab Banyumas Tahun 2012

Tabel 2.15. Kegiatan RHL Tahun 2013

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)
A	Vegetatif		
1.	RHL Kawasan Lindung	50 ha	1. Dermaji/Lumbir
2.	Kebun Bibit Rakyat	52 kelompok Setara dengan luasan = 52 X 100 ha = 5.200 ha	2. Gumelar/Gumelar 3. Tlaga/Gumelar 4. Samudra Kulon/Gumelar 5. Besuki/Lumbir 6. Canduk/Lumbir 7. Cirahab/Lumbir 8. Pengadegan/Wangon 9. Karangmangu/Purwojati 10. Sokawera/Somagede 11. Binangun/Banyumas 12. Karangsalam/Baturaden 13. Kemutug Lor/Baturaden 14. Kebumen/Baturaden 15. Karangtengah/Baturaden 16. Kasageran/Cilongok 17. Singasari/Karanglewas 18. Karangtengah/Cilongok 19. Mandirancan/Kebasen 20. Karangklesem/Ajibarang 21. Semedo/Pekuncen 22. Kranggan/Pekuncen 23. Kracak/Ajibarang 24. Cingebul/Lumbir 25. Banjarsari/Ajibarang 26. Limpakuwus/Sumbang 27. Kebasen/Kebasen 28. Alasmalang/Kemranjen 29. Baseh/Kedungbanteng 30. Windujaya/Kedungbanteng 31. Cihonje/Gumelar 32. Lebeng/Sumpiuh 33. Cilangkap/Gumelar 34. Gambarsari/Kebasen 35. Selanegera/Sumpiuh 36. Sunyalangu/Karanglewas 37. Somagede/Somagede 38. Tanggeran/Somagede 39. Karangsalam/Kemranjen 40. Klinting/Somagede 41. Cikakak/Wangon 42. Cibangkong/Ajibarang 43. Watuagung/Tambak 44. Candinegara/Pekuncen 45. Karangsari/Kebasen 46. Karanglo/Cilongok 47. Gununglurah/Cilongok 48. Pageraji/Cilongok 49. Pageralang/Kemranjen 50. Karanggintung/Kemranjen 51. Gunungwetan/Jatilawang

No	Jenis Kegiatan	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)
			52. Kalitapen/Purwojati 53. Pasinggangan/Banyumas
3.	BLM-PPMPBK	84 ha	1. Kanding/Somagede 2. Tanggeran/Somagede 3. Klinting/Somagede 4. Kecila/Kemranjen 5. Gumelar Lor/Tambak 6. Karang Gintung/Kemranjen 7. Kalisube/Banyumas 8. Sidamulih/Rawalo 9. Sanggreman/Rawalo 10. Kedunggede/Lumbir 11. Sambirata/Cilongok 12. Karangsalam/Baturaden
B.	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air		
1.	Dam Penahan (DPn)	2 Unit	1. Pengadegan/Wangon 2. Klinting/Somagede
2.	Gully Plug (GP)	9 Unit	1. Pengadegan/Wangon 2. Canduk/Lumbir (2 unit) 3. Klinting/Somagede 4. Bogangin/Sumpiuh (5 unit)

D. Kondisi Kelembagaan

Kelembagaan Kehutanan di Kabupaten Banyumas yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Negara dan Hutan Rakyat adalah sebagai berikut :

- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas
- Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
- Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yaitu KPH Banyumas Barat, KPH Banyumas Timur dan KPH Kedu Selatan.
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- BPDAS Serayu Opak Progo
- BPDAS Cimanuk Citanduy
- BKSDA Jawa Tengah

✓

- Forum DAS Kabupaten Banyumas
- Lembaga Masyarakat Desa Hutan
- Kelompok Tani Hutan Rakyat

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas merupakan institusi yang paling di depan/ujung tombak dalam pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat dan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas. Dasar Pembentukan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas (Dinpertanbunhut) adalah Perda Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas” dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang “Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas”.

Tugas Pokok Dinpertanbunhut Kabupaten Banyumas adalah melaksanakan teknis operasional sebagian pemerintah daerah subbidang tanaman pangan dan hortikultura, subbidang penunjang pada urusan perkebunan dan subbidang pemerintah daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun fungsi Dinpertanbunhut Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis lingkup pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum lingkungan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

✓

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi Dinpertenbunhut dijabarkan secara teknis dalam program – program diantaranya adalah :

- ✓ Peningkatan kesejahteraan petani
- ✓ Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- ✓ Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- ✓ Peningkatan ketahanan pangan
- ✓ Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- ✓ Pemberdayaan penyuluh pertanian
- ✓ Pengembangan investasi pertanian
- ✓ Pengembangan agribisnis
- ✓ Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
- ✓ Rehabilitasi hutan dan lahan
- ✓ Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- ✓ Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- ✓ Perencanaan dan pengembangan hutan

Untuk melaksanakan program - program Dinpertenbunhut Kabupaten Banyumas seperti tersebut di atas, maka diperlukan dukungan SDM yang cukup dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok setiap bidang. Data terakhir kondisi SDM Dinpertenbunhut dan SDM yang menangani bidang kehutanan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :



- Penyuluh Kehutanan = 16 orang
- Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat = 1 orang
- Pegawai Dinpertanbunhut Kabupaten Banyumas = 45 orang di kantor dinas kabupaten, 9 orang di UPT, menangani bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan. SDM khusus kehutanan hanya 7 orang di kantor dan 2 orang di UPT).



III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

A. Kebijakan dan Strategi Umum Pembangunan Daerah

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2013–2018 adalah :

“ TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA ”

Pemerintahan yang **bersih**, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Pemerintahan yang **adil** berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan,



pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman.

Masyarakat yang **sejahtera** menurut Joseph Murphy pada bukunya *"Think Yourself Rich"* dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat

pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta *virtuous cycle* dampak pembelajaran.

Masyarakat yang **berbudaya**. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga



dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Belandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan

sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk



maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat

dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah

Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius.

✓

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki *multiplier* efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu dilakukan upaya

✓

untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah.

Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu

menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat.

Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat

Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan

✓

memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan

Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokkan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.

Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, *urban primacy* yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

✓

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

✓

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki.

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran. Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut :



Misi 1 : Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat, dijabarkan melalui tujuan :

- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
 - 2) Meningkatnya kualitas SDM aparatur
 - 3) Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
 - 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah :

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - 3) Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi
 - 4) Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi.

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, dijabarkan melalui tujuan:

- a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, sasaran yang hendak dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat.
 - 2) Meningkatnya kualitas anak didik.
 - 3) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
 - 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

MISI 3 : Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah, dijabarkan melalui tujuan:

- a. Peningkatan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan.

✓

- 2) Meningkatnya ketahanan pangan.
 - 3) Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.
- b. Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah :
- 1) Meningkatnya kinerja sektor pariwisata.
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri.
 - 3) Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan.
 - 4) Meningkatnya perlindungan terhadap ketenagakerjaan.
 - 5) Meningkatnya kinerja sektor keuangan dan sektor ekonomi lainnya.
 - 6) Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dijabarkan melalui tujuan :

- a. Peningkatan peran serta sektor agribisnis dalam pertumbuhan perekonomian, sasaran yang hendak dicapai adalah:
- 1) Meningkatnya inovasi terhadap produk-produk agribisnis.
 - 2) Meningkatnya perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis.
- 

- b. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM, sasaran yang hendak dicapai adalah :

Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan.

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dijabarkan melalui tujuan:

- a. Peningkatkan ketersediaan kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah :
- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah
 - 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
 - 3) Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan
 - 4) Meningkatnya ketersediaan perumahan layak huni.
- b. Pewujudan pembangunan berwawasan lingkungan, sasaran yang hendak dicapai adalah :
- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - 2) Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup
 - 3) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

✓

MISI 6 : Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan,
dijabarkan melalui tujuan :

- a. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial, sasaran yang hendak dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan
- b. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis, sasaran yang hendak dicapai adalah :
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis.
- c. Pewujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat
 - 2) Meningkatnya penanganan bencana
 - 3) Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak.
 - 4) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.

Misi 7 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa, dijabarkan melalui tujuan :

- a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya kerukunan hidup beragama.
 - 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - 3) Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peningkatan pelestarian seni dan budaya tradisonal, sasaran yang hendak dicapai adalah :
 - 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal.
 - 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya.
- c. Pengembangan potensi pemuda dan olah raga, sasaran yang hendak dicapai adalah, meningkatnya generasi muda bertakwa serta meningkatnya prestasi olahraga.

✓

B. Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten

Banyumas

Visi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas adalah “Terwujudnya Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang produktif, efisien, lestari berwawaskan lingkungan serta berpotensi investasi, didukung pemerintah yang amanah menuju kesejahteraan petani”. Misi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas adalah :

- Mengembangkan pertanian perkebunan dan kehutanan yang maju, berkeadilan, merata, berkelanjutan, berkerakyatan, berwawasan lingkungan dan investasi melalui pemberdayaan masyarakat.
- Mengembangkan teknologi dan informasi serta penyediaan sarana produksi guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian, kebun dan hutan secara lestari.
- Menyelenggarakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan.
- Memberdayakan kelompok tani dan meningkatkan pendapatan dan peran serta masyarakat sekitar lahan dan hutan
- Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi produksi pertanian perkebunan dan kehutanan.
- Meningkatkan kinerja aparatur dalam pembangunan pertanian perkebunan dan kehutanan serta pelayanan kepada masyarakat.

IV. SASARAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

A. Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan 15 Tahun (2010 – 2024)

Secara umum sasaran kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas adalah pada lahan di luar kawasan hutan negara dengan kategori sebagai berikut :

1. Kawasan Budidaya dengan status kekritisan lahan : Sangat Kritis (SK), Kritis (K) dan Agak Kritis (AK).
2. Kawasan Lindung di Luar Hutan dengan status kekritisan lahan : Sangat Kritis (SK), Kritis (K) dan Agak Kritis (AK).

Adapun untuk lahan dengan status kekritisan lahan : Potensial Kritis (PK), dan Tidak Kritis (TK) tidak dipilih untuk menjadi sasaran kegiatan RHL.

Sasaran kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada jangka 15 tahun (2010 – 2024) di Kabupaten Banyumas sudah disusun dalam dokumen RTk-RHL oleh BPDAS Serayu Opak Progo dan BPDAS Cimanuk Citanduy. Sasaran RHL selama 15 tahun tersebut merupakan “wilayah penyusunan RPRHL” untuk satu Kabupaten Banyumas selama 15 tahun. Selanjutnya sasaran/wilayah penyusunan RPRHL berdasarkan RTk-RHL dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :



Tabel 4.1. Wilayah Penyusunan RTk-RHL Kabupaten Banyumas Selama 15 tahun (2010 – 2024)

No	Nama DAS	Kecamatan	Fungsi Kawasan		Total (ha)
			Budidaya	Lindung diluar Hutan	
1	IJO	KEMRANJEN	476,22	506,49	982,71
		SOMAGEDE	-	719,08	719,08
		SUMPIUH	645,61	558,01	1.203,61
		TAMBAK	124,24	146,97	271,21
	Jumlah DAS IJO		1.246,06	1.930,55	3.176,61
2	SERAYU	AJIBARANG	919,49	1.358,28	2.277,77
		BANYUMAS	1.010,15	553,23	1.563,38
		BATURADEN	344,89	516,27	861,16
		CILONGOK	1.004,51	470,62	1.475,14
		GUMELAR	855,10	4.072,53	4.927,63
		JATILAWANG	-	918,70	918,70
		KALIBAGOR	27,71	-	27,71
		KARANGLEWAS	522,80	31,39	554,19
		KEBASEN	598,61	47,67	646,28
		KEDUNG BANTENG	1.156,81	-	1.156,81
		LUMBIR	279,77	1.707,77	1.987,54
		PATIKRAJA	689,47	188,86	878,33
		PEKUNCEN	480,30	1.743,89	2.224,20
		PURWOJATI	1.086,00	630,62	1.716,62
		RAWALO	718,36	100,83	819,18
		SOMAGEDE	81,88	1.421,81	1.503,69
		SUMBANG	525,56	636,46	1.162,03
		WANGON	286,61	2.364,77	2.651,38
	Jumlah DAS SERAYU		10.588,02	16.763,72	27.351,73
3	TIPAR	BANYUMAS	34,44	16,24	50,68
		KEBASEN			

No	Nama DAS	Kecamatan	Fungsi Kawasan		Total (ha)
			Budidaya	Lindung diluar Hutan	
			1.891,18	235,73	2.126,91
		KEMRANJEN	47,71	-	47,71
	Jumlah DAS TIPAR		1.973,33	251,97	2.225,31
4	CITANDUY	LUMBIR	417,55	-	417,55
		GUMELAR	62,26	-	62,26
	Jumlah DAS CITANDUY		479,81	-	479,81
	Jumlah Total		14.287,22	18.946,24	33.233,46

Sumber : Pengolahan Data RTk-RHL 2010 – 2024

Dari tabel di atas diperoleh luasan sasaran RHL 15 tahun (2010 – 2024) seluas **33.233,46** hektar yang tersebar di 4 DAS utama di Kabupaten Banyumas. Jumlah 33.233,46 hektar tersebut merupakan lokasi keseluruhan dari kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan (Hutan Rakyat/Pengkayaan), Pengendalian Erosi dan Sedimentasi (Gully plug, Dam Penahan, Dam Pengendali) serta Pengembangan Sumberdaya Air (Perlindungan mata air dan Sumur Resap). Adapun rincian luasan per kegiatan adalah sbb :

1. Pemulihan Hutan dan Lahan (Hutan Rakyat/Pengkayaan) = 32.868,87 ha
2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi (Gully plug, Dam Penahan, Dam Pengendali) = 5,10 ha (luas bangunannya)
3. Pengembangan Sumberdaya Air (Perlindungan mata air dan Sumur Resap) = 359,49 ha (per unit pengembangan mata air memiliki luas 3, 126 ha)

✓

Pada dasarnya penyusunan dokumen RPRHL pada jangka pertama (2010 – 2014) pada tiap Kabupaten/Kota harus sudah selesai disusun sekitar tahun 2010/2011, sehingga dalam jangka waktu 15 tahun akan disusun dokumen RP-RHL selama 3 periode lima tahunan yaitu, RP-RHL (2010 – 2014), (2015 – 2019) dan (2010 – 24). Sebagai tambahan informasi, bahwa Kabupaten Banyumas pada tahun 2010/2011 belum dapat menyusun dokumen RP-RHL dikarenakan beberapa hal/kendala. Baru dapat menyusun dokumen RP-RHL pada tahun 2013 ini. Sesuai hasil konsultasi dengan BP DAS Serayu Opak Progo Yogyakarta, bahwa Kabupaten Banyumas dapat melakukan penyusunan dokumen RP-RHL dengan waktu “*start*” yang disesuaikan, yaitu dimulai pada tahun 2014 dengan mempertimbangkan RHL yang sudah dilaksanakan pada tahun 2010 s/d 2013. Jadi dokumen RP-RHL yang akan disusun adalah periode 2014 – 2018 (5 tahun) dan 2019 – 2024 (5 tahun + 1 tahun).

Kegiatan RHL (khususnya kegiatan pemulihan hutan dan lahan atau hutan rakyat dan pengkayaan hutan rakyat) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 – 2013 pada lokasi LMU terpilih diperoleh hasil kalkulasi seluas 18.209 ha. Selanjutnya luasan sasaran RHL selama 15 tahun dikurangi kegiatan RHL selama 4 tahun diperoleh hasil sebagai berikut : $32.868,87 \text{ ha} - 18.209 \text{ ha} = \underline{\underline{14.659,87 \text{ ha}}}$. Luasan tersebut apabila dibagi dengan sisa jangka RTk yaitu 11 tahun (2014 – 2024) maka diperoleh luasan setiap tahunnya adalah 1.332,72 ha. Selanjutnya untuk sebaran sasaran RHL pada sisa jangka RTk-RHL (11 tahun) dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini :



Tabel 4.2. Rekapitulasi sasaran kegiatan RHL per periode selama jangka waktu 15 tahun (siswa jangka 11 tahun)

No	Nama Kegiatan	Satuan	Periode		Total	Keterangan
			2014 - 2018	2019 - 2024		
1	Pemulihan Hutan dan Lahan	Hektar	6.670,4 2	7.989,4 5	14.659,8 7	Hutan Rakyat dan Pengkayaan
2	Pengendalian Erosi dan Sedimentasi					
a	Gully Plug (GP)	Unit	97	114	211	258 total dengan di luar lahan kritis
b	Dam Penahan (DPn)	Unit	26	31	57	80 total dengan luar lahan kritis
c	Dam Pengendali (Dpi)	Unit	9	11	20	22 total dengan luar lahan kritis
d	Pembuatan Teras/SPA/Rorak	Hektar	4.760,4 3	5.739,0 9	10.499,5 2	Hanya berada di lokasi dengan kriteria : Hulu, Kawasan lindung di luar hutan dan kelas kelereng IV.
3	Pengembangan Sumberdaya Air					
a	Penyelamatan Mata Air	titik/hektar	52	63	115	setiap titik luas 3,126 ha
b	Sumur Resap	Unit	27	33	60	

Sumber : Pengolahan Data RTk-RHL 2010 – 2024

B. Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5 Tahun

Sasaran RHL 5 tahun untuk periode 2014 – 2018 seperti terlihat dalam tabel 4.2. lalu di jabarkan setiap tahunannya. Volume kegiatan tahunan untuk selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RTn-RHL. Sasaran RHL 5 tahunan terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu 1). Pemulihan Hutan dan lahan, 2). Pengendalian Erosi dan Sedimentasi serta 3.) Pengembangan Sumberdaya Air. Rincian setiap kegiatan utama RHL 5 tahun (2014 – 2015) adalah sebagai berikut :



1. Pemulihan Hutan dan Lahan

Kegiatan pemulihan hutan dan lahan untuk periode RP-RHL 2014 – 2018 difokuskan pada lahan dengan fungsi “Kawasan Lindung di Luar Hutan” dengan kategori Sangat Kritis/Kritis/Agak Kritis dan “Kawasan Budidaya “ dengan kategori Sangat Kritis/Kritis. Luasan sasaran untuk kegiatan ini adalah 6.670,42 hektar. Kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan ini terdiri dari Pembuatan Hutan Rakyat seluas 3.075,54 hektar dan Pengkayaan Hutan Rakyat seluas 3.594,88 hektar. Adapun sebaran setiap tahun dan lokasinya dapat dilihat pada Tabel 4.3. dan 4.4. serta lampiran 1 a. Peta Kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan.

2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi

Kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi untuk periode RP-RHL 2014 – 2018 difokuskan pada alur sungai yang merupakan daerah tangkapan air di lahan dengan fungsi “Kawasan Lindung di Luar Hutan” dengan kategori Sangat Kritis/Kritis/Agak Kritis dan “Kawasan Budidaya “ dengan kategori Sangat Kritis/Kritis. Kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi terdiri dari pembuatan bangunan sipil teknis (Gully plug, Dam Penahan dan Dam Pengendali) dan pembuatan teras, saluran pembuangan air (SPA) dan rorak. Volume kegiatannya adalah sbb :

- Gully Plug = 97 unit
- Dam Penahan = 26 unit
- Dam Pengendali = 9 unit
- Pembuatan Teras, SPA dan Rorak = 4.760,43 hektar

Selanjutnya sebaran setiap tahun dan lokasinya dapat dilihat pada tabel 4.5 s/d 4.8 dan Lampiran 1 b. Peta Kegiatan Sipil Teknis (Pembuatan Dam Pengendali, Dam Penahan dan Gully Plug) serta Lampiran 1c. Peta Kegiatan Pembuatan Teras, Rorak, SPA.

3. Pengembangan Sumberdaya Air

Kegiatan pengembangan sumberdaya air untuk periode RP-RHL 2014 – 2018 difokuskan pada titik – titik sumber mata air pada lahan dengan fungsi “Kawasan Lindung di Luar Hutan” dengan kategori Sangat Kritis/Kritis/Agak Kritis dan “Kawasan Budidaya” dengan kategori Sangat Kritis/Kritis. Kegiatan pengembangan sumberdaya air terdiri dari perlindungan/penyelamatan sumber mata air dan pembuatan sumur resap. Volume kegiatannya adalah sbb :

- Sumur Resap = 27 unit
- Perlindungan/penyelamatan sumber mata air = 52 titik atau 162,52 ha

Selanjutnya sebaran setiap tahun dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 4.10 dan lokasinya pada lampiran 1 d. Peta Kegiatan Pembuatan Sumur Resap dan Perlindungan Sumber Mata Air.

Tabel 4.3. Sasaran Wilayah Penyusunan RP – RHL 2014 – 2018 untuk Kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan (Pembuatan Hutan Rakyat)

No	UTP-RHL*)	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78224/HR-HuKL/DARMAKRADENAN	43,48	281.557	9.180.296	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	43,48				
2	78284/HR-HuKL/DARMAKRADENAN	49,19	281.595	9.179.581	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	49,19				
3	78285/HR-HuKL/DARMAKRADENAN	32,44	283.944	9.177.802	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	32,44				
4	78284/HR-HuKL/DARMAKRADENAN	31,18	281.447	9.179.867	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		31,18			
5	78310/HR-HuKL/TIPAR KIDUL	64,25	283.668	9.176.268	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		64,25			
6	78243/HR-HuKL/DARMAKRADENAN	25,22	284.052	9.181.249	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		25,22			
7	78248/HR-HuKL/DARMAKRADENAN	21,15	283.292	9.180.929	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		21,15			
8	78248/HR-HuKB/DARMAKRADENAN	13,46	283.681	9.180.723	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		13,46			
9	78284/HR-HuKL/DARMAKRADENAN	32,36	283.202	9.177.858	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		32,36			
10	78284/HR-HuKB/DARMAKRADENAN	11,94	281.261	9.179.892	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		11,94			
11	78310/HR-HuKL/DARMAKRADENAN	58,25	282.992	9.177.025	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		58,25			
12	78254/HR-HuKB/PANCASAN	48,73	288.475	9.178.670	AJIBARANG	PANCASAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			48,73		
13	78309/HR-HuKB/PANCASAN	13,73	288.132	9.177.996	AJIBARANG	PANCASAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			13,73		
14	78309/HR-HuKB/SAWANGAN	19,25	288.355	9.177.805	AJIBARANG	SAWANGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			19,25		
15	78310/HR-HuKL/TIPAR KIDUL	15,84	282.883	9.176.434	AJIBARANG	TIPAR KIDUL	SERAYU	Sub DAS Tajum			15,84		
16	78396/HR-TgKB/PAPRINGAN	39,88	305.902	9.169.373	BANYUMAS	PAPRINGAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen			39,88		
17	78175/HR-TgKB/KEMUTUG KIDUL	12,78	306.014	9.187.603	BATU RADEN	KEMUTUG KIDUL	SERAYU	Sub DAS Klawing			12,78		

No	UTP-RHL*)	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	78175/HR-TgKB/KEMUTUG KIDUL	9,38	305.785	9.188.503	BATU RADEN	KEMUTUG KIDUL	SERAYU	Sub DAS Klawing			9,38		
19	78175/HR-TgKB/REMPOAH	16,48	305.690	9.185.847	BATU RADEN	REMPOAH	SERAYU	Sub DAS Klawing			16,48		
20	78242/HR-TgKB/REMPOAH	11,28	306.142	9.184.806	BATU RADEN	REMPOAH	SERAYU	Sub DAS Klawing			11,28		
21	78144/HR-HuKL/SAMUDRA	31,34	279.963	9.188.663	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	31,34				
22	78160/HR-HuKL/SAMUDRA	99,60	277.711	9.188.062	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	99,60				
23	78160/HR-HuKL/SAMUDRA	75,22	278.884	9.188.395	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	75,22				
24	78182/HR-HuKL/SAMUDRA	42,54	278.512	9.187.757	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	42,54				
25	78182/HR-HuKL/SAMUDRA	10,07	279.339	9.187.255	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	10,07				
26	78224/HR-HuKL/GANCANG	23,41	280.810	9.180.941	GUMELAR	GANCANG	SERAYU	Sub DAS Tajum	23,41				
27	78224/HR-HuKL/GANCANG	22,39	280.827	9.180.944	GUMELAR	GANCANG	SERAYU	Sub DAS Tajum	22,39				
28	78224/HR-HuKL/KEDUNGURANG	59,24	283.353	9.182.873	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum	59,24				
29	78302/HR-HuKL/KARANGKEMOJING	109,72	280.358	9.176.691	GUMELAR	KARANG KEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum	109,72				
30	78144/HR-HuKL/SAMUDRA	15,12	281.646	9.188.614	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		15,12			
31	78160/HR-HuKL/SAMUDRA	28,20	276.684	9.187.881	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		28,20			
32	78182/HR-HuKL/SAMUDRA	14,77	279.285	9.187.897	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		14,77			
33	78182/HR-HuKL/SAMUDRA	11,65	279.333	9.187.960	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		11,65			
34	78182/HR-HuKL/SAMUDRA	11,89	278.819	9.187.814	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		11,89			
35	78293/HR-HuKL/KARANGKEMOJING	26,51	278.701	9.177.759	GUMELAR	KARANG KEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum		26,51			
36	78144/HR-HuKL/SAMUDRA	16,21	281.795	9.186.788	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		16,21			

No	UTP-RHL*)	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	78144/HR-HuKL/SAMUDRA	14,46	279.576	9.188.284	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		14,46			
38	78144/HR-HuKL/SAMUDRA	23,35	279.576	9.187.729	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		23,35			
39	78160/HR-HuKL/SAMUDRA	15,41	278.885	9.188.809	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		15,41			
40	78160/HR-HuKL/SAMUDRA	19,34	276.458	9.187.763	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		19,34			
41	78182/HR-HuKB/SAMUDRA	43,86	278.316	9.186.841	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		43,86			
42	78182/HR-HuKB/SAMUDRA	9,83	279.241	9.186.865	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum			9,83		
43	78224/HR-HuKB/KEDUNGURANG	19,67	282.720	9.182.383	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum			19,67		
44	78326/HR-HuKL/KARANGKEMOJING	9,81	280.554	9.175.845	GUMELAR	KARANG KEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum			9,81		
45	78439/HR-HuKL/KARANGLEWAS	20,24	293.871	9.163.608	JATI LAWANG	KARANGLEWAS	SERAYU	Sub DAS Tajum	20,24				
46	78481/HR-HuKL/GUNUNG WETAN	90,94	289.687	9.162.444	JATI LAWANG	GUNUNG WETAN	SERAYU	Sub DAS Serayu Hilir	90,94				
47	78481/HR-HuKL/GUNUNG WETAN	20,09	288.107	9.163.253	JATI LAWANG	GUNUNG WETAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	20,09				
48	78508/HR-HuKL/PEKUNCEN	77,26	292.441	9.163.034	JATI LAWANG	PEKUNCEN	SERAYU	Sub DAS Tajum	77,26				
49	78508/HR-HuKL/GUNUNG WETAN	41,56	290.944	9.162.356	JATI LAWANG	GUNUNG WETAN	SERAYU	Sub DAS Serayu Hilir		41,56			
50	78439/HR-HuKL/PEKUNCEN	11,48	293.532	9.163.595	JATI LAWANG	PEKUNCEN	SERAYU	Sub DAS Tajum		11,48			
51	78153/HR-HuKB/SUNYALANGU	8,08	298.746	9.188.851	KARANG LEWAS	SUNYALANGU	SERAYU	Sub DAS Logawa			8,08		
52	78396/HR-TgKB/MANDIRANCAN	134,57	305.083	9.169.482	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		134,57			
53	78450/HR-HuKB/KALISALAK	22,02	304.513	9.167.110	KEBASEN	KALISALAK	TIPAR	DAS Tipar Hulu		22,02			
54	78372/HR-TgKB/MANDIRANCAN	9,12	302.862	9.169.447	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen			9,12		

No	UTP-RHL*)	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	78407/HR-TgKB/MANDIRANCAN	90,83	304.085	9.168.955	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen			90,83		
56	78461/HR-HuKB/SAWANGAN	21,72	304.946	9.164.820	KEBASEN	SAWANGAN	TIPAR	DAS Tipar Hulu			21,72		
57	78495/HR-HuKB/KALIWEDI	8,08	306.712	9.164.297	KEBASEN	KALIWEDI	TIPAR	DAS Tipar Hulu			8,08		
58	78512/HR-HuKB/ADISANA	15,49	309.238	9.162.706	KEBASEN	ADISANA	TIPAR	DAS Tipar Hulu			15,49		
59	78462/HR-HuKL/KARANGSALAM	70,19	316.887	9.164.802	KEMRAN JEN	KARANGSALAM	IJO	Sub DAS Gatel		70,19			
60	78462/HR-HuKL/KARANGSALAM	12,92	316.688	9.164.470	KEMRAN JEN	KARANGSALAM	IJO	Sub DAS Gatel		12,92			
61	78498/HR-HuKB/ALASMALANG	34,77	313.037	9.162.125	KEMRAN JEN	ALASMALANG	IJO	Sub DAS Gatel		34,77			
62	78462/HR-HuKB/KARANGSALAM	9,63	315.921	9.164.600	KEMRAN JEN	KARANGSALAM	IJO	Sub DAS Gatel			9,63		
63	78341/HR-HuKL/CIDORA	20,78	277.631	9.173.729	LUMBIR	CIDORA	SERAYU	Sub DAS Tajum	20,78				
64	78234/HR-HuKL/DERMAJI	77,51	275.326	9.180.743	LUMBIR	DERMAJI	SERAYU	Sub DAS Tajum		77,51			
65	78424/HR-HuKL/PARUNGKAMAL	9,60	281.145	9.168.402	LUMBIR	PARUNGKAMAL	SERAYU	Sub DAS Tajum		9,60			
66	78231/HR-HuKL/TUMIYANG	28,77	291.989	9.188.462	PEKUNCEN	TUMIYANG	SERAYU	Sub DAS Tajum		28,77			
67	78169/HR-TgKL/KRAJAN	12,92	288.745	9.189.585	PEKUNCEN	KRAJAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		12,92			
68	78230/HR-HuKB/CIBANGKONG	15,83	285.206	9.183.898	PEKUNCEN	CIBANGKONG	SERAYU	Sub DAS Tajum		15,83			
69	78231/HR-HuKL/TUMIYANG	9,24	292.245	9.189.105	PEKUNCEN	TUMIYANG	SERAYU	Sub DAS Tajum		9,24			
70	78164/HR-HuKB/KARANGKEMIRI	20,16	286.374	9.186.973	PEKUNCEN	KARANGKEMIRI	SERAYU	Sub DAS Tajum			20,16		
71	78427/HR-HuKL/KEMAWI	56,88	321.192	9.167.272	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Gume-Piasa	56,88				
72	78459/HR-HuKL/KEMAWI	174,75	319.482	9.165.696	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel	174,75				

No	UTP-RHL*)	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	78528/HR-HuKL/KEMAWI	59,90	319.371	9.164.745	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel	59,90				
74	78427/HR-HuKL/KEMAWI	62,74	320.210	9.167.926	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Gume- Piasa		62,74			
75	78427/HR-HuKL/KEMAWI	48,00	320.487	9.166.716	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		48,00			
76	78443/HR-HuKL/KEMAWI	8,39	317.814	9.166.505	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		8,39			
77	78462/HR-HuKL/KEMAWI	31,47	317.903	9.165.918	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		31,47			
78	78422/HR-HuKB/KEMAWI	19,66	319.545	9.167.455	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Kejawen			19,66		
79	78121/HR- TgKL/LIMPAKUWUS	32,14	307.353	9.192.504	SUMBANG	LIMPAKUWUS	SERAYU	Sub DAS Klawing		32,14			
80	78175/HR- TgKL/LIMPAKUWUS	8,09	306.880	9.192.208	SUMBANG	LIMPAKUWUS	SERAYU	Sub DAS Klawing		8,09			
81	78519/HR-HuKL/KETANDA	47,45	318.651	9.162.916	SUMPIUH	KETANDA	IJO	Sub DAS Gatel	47,45				
82	78310/HR-HuKL/CIKAKAK	27,11	283.358	9.175.168	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum	27,11				
83	78333/HR-HuKL/CIKAKAK	109,59	284.890	9.172.755	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum	109,59				
84	78475/HR- HuKL/PANGADEGAN	27,01	285.866	9.163.479	WANGON	PANGADEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	27,01				
85	78309/HR- HuKL/WINDUNEGARA	15,42	288.518	9.175.199	WANGON	WINDUNEGARA	SERAYU	Sub DAS Tajum		15,42			
86	78310/HR-HuKL/CIKAKAK	25,33	283.400	9.175.526	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum		25,33			
87	78332/HR-HuKL/CIKAKAK	12,33	283.213	9.173.063	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum		12,33			
88	78333/HR-HuKL/CIKAKAK	16,51	284.413	9.173.661	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum		16,51			
89	78352/HR-HuKL/CIKAKAK	16,42	283.172	9.172.291	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum		16,42			
90	78309/HR- HuKB/WINDUNEGARA	15,42	288.518	9.175.199	WANGON	WINDUNEGARA	SERAYU	Sub DAS Tajum			15,42		

No	UTP-RHL*)	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	78361/HR-HuKL/CIKAKAK	43,27	284.018	9.172.036	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum			43,27		
	Jumlah	3.075,54							1.330,63	1.256,80	488,11	0	0

*) Cara membaca kode UTP-RHL adalah sebagai berikut :

Contoh kode UTP-RHL = 78224/HR-HuKL/DARMAKRADENAN

a). 78224 = Kode MiniDAS

b). HR = Pembuatan Hutan Rakyat, PHR = Pengkayaan Hutan Rakyat, GP = Gully Plug, DPn = Dam Penahan, DPi= Dam Pengendali, SRA = Sumur Resap, PMA = Perlindungan Mata Air, T = Teras, SPA = Saluran Pembuangan Air, Ro = Rorak

c). Hu = Bagian Hulu DAS, Tg = Bagian Tengah DAS, Hi = Bagian Hilir DAS

d). KL = Kawasan lindung di luar hutan negara, KB = Kawasan Budidaya

e). DARMAKRADENAN = Nama alamat Desa

✓

Tabel 4.4. Sasaran Wilayah Penyusunan RP – RHL 2014 – 2018 untuk Kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan (Pengkayaan Hutan Rakyat)

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78243/PHR-HuKL/DARMAKRADENAN	23,063	284330	9181268	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			23,06		
2	78310/PHR-HuKL/TIPAR KIDUL	23,066	283816	9177038	AJIBARANG	TIPAR KIDUL	SERAYU	Sub DAS Tajum				23,07	
3	78310/PHR-HuKL/TIPAR KIDUL	29,278	283313	9176614	AJIBARANG	TIPAR KIDUL	SERAYU	Sub DAS Tajum				29,28	
4	78310/PHR-HuKL/TIPAR KIDUL	50,365	282862	9175833	AJIBARANG	TIPAR KIDUL	SERAYU	Sub DAS Tajum					50,37
5	78413/PHR-HuKL/DAWUHAN	42,728	308191	9168009	BANYUMAS	DAWUHAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen				42,73	
6	78469/PHR-HuKL/KEJAWAR	21,988	312489	9165657	BANYUMAS	KEJAWAR	SERAYU	Sub DAS Kejawen					21,99
7	78195/PHR-HuKL/SOKAWERA	40,396	297189	9185930	CILONGOK	SOKAWERA	SERAYU	Sub DAS Logawa			40,40		
8	78182/PHR-HuKL/SAMUDRA	30,873	278901	9187817	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum			30,87		
9	78207/PHR-HuKL/KEDUNGURANG	48,259	280388	9184649	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum			48,26		
10	78224/PHR-HuKL/GANCANG	30,067	282177	9181269	GUMELAR	GANCANG	SERAYU	Sub DAS Tajum			30,07		
11	78224/PHR-HuKL/KEDUNGURANG	44,947	283197	9183374	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum			44,95		
12	78224/PHR-HuKL/SAMUDRA	47,385	280213	9186517	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum			47,39		
13	78224/PHR-HuKL/KEDUNGURANG	18,797	280698	9183620	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum			18,80		
14	78302/PHR-HuKL/PANINGKABAN	86,563	279837	9179241	GUMELAR	PANINGKABAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			86,56		
15	78332/PHR-HuKL/KARANGKEMOJING	35,649	281889	9176293	GUMELAR	KARANG KEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum			35,65		
16	78160/PHR-HuKL/SAMUDRA	68,863	276855	9186557	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum				68,86	

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	78176/PHR-HuKL/SAMUDRA	19,459	277004	9185586	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum				19,46	
18	78224/PHR-HuKL/KEDUNGURANG	107,081	283014	9183101	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum				107,08	
19	78224/PHR-HuKL/KEDUNGURANG	24,521	282892	9182940	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum				24,52	
20	78224/PHR-HuKL/KEDUNGURANG	35,509	281822	9182676	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum				35,51	
21	78302/PHR-HuKL/KARANGKEMOJING	101,497	280084	9178146	GUMELAR	KARANG KEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum				101,50	
22	78224/PHR-HuKL/KEDUNGURANG	34,442	281051	9184361	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum					34,44
23	78234/PHR-HuKL/PANINGKABAN	17,712	278939	9179363	GUMELAR	PANINGKABAN	SERAYU	Sub DAS Tajum					17,71
24	78234/PHR-HuKL/PANINGKABAN	26,072	278966	9179177	GUMELAR	PANINGKABAN	SERAYU	Sub DAS Tajum					26,07
25	78332/PHR-HuKL/KARANGKEMOJING	66,639	281836	9175760	GUMELAR	KARANG KEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum					66,64
26	78481/PHR-HuKL/GUNUNG WETAN	29,834	290034	9163265	JATI LAWANG	GUNUNG WETAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				29,83	
27	78368/PHR-HuKL/TUNJUNG	62,327	291407	9169965	JATI LAWANG	TUNJUNG	SERAYU	Sub DAS Tajum					62,33
28	78461/PHR-HuKL/SAWANGAN	18,531	305994	9165185	KEBASEN	SAWANGAN	TIPAR	DAS Tipar Hulu				18,53	
29	78450/PHR-HuKL/KALISALAK	33,125	305988	9166420	KEBASEN	KALISALAK	TIPAR	DAS Tipar Hulu					33,13
30	78509/PHR-HuKL/KARANGSALAM	58,457	316061	9163298	KEMRAN JEN	KARANGSALAM	IJO	Sub DAS Gatel				58,46	
31	78341/PHR-HuKL/CIDORA	110,469	276354	9173487	LUMBIR	CIDORA	SERAYU	Sub DAS Tajum			110,47		
32	78360/PHR-HuKL/PARUNGKAMAL	56,537	280311	9170340	LUMBIR	PARUNGKAMAL	SERAYU	Sub DAS Tajum				56,54	
33	78424/PHR-HuKL/PARUNGKAMAL	137,736	281445	9168425	LUMBIR	PARUNGKAMAL	SERAYU	Sub DAS Tajum				137,74	
34	78341/PHR-HuKL/CIDORA	39,101	275585	9173454	LUMBIR	CIDORA	SERAYU	Sub DAS Tajum					39,10

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	78164/PHR-HuKL/KARANGKEMIRI	99,808	286381	9187603	PEKUNCEN	KARANGKEMIRI	SERAYU	Sub DAS Tajum			99,81		
36	78224/PHR-HuKL/PETAHUNAN	30,667	282456	9184786	PEKUNCEN	PETAHUNAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			30,67		
37	78224/PHR-HuKL/PETAHUNAN	73,281	284235	9184378	PEKUNCEN	PETAHUNAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			73,28		
38	78164/PHR-HuKL/KARANGKEMIRI	55,728	286282	9186187	PEKUNCEN	KARANGKEMIRI	SERAYU	Sub DAS Tajum				55,73	
39	78164/PHR-HuKL/KARANGKEMIRI	105,696	285339	9187114	PEKUNCEN	KARANGKEMIRI	SERAYU	Sub DAS Tajum					105,70
40	78224/PHR-HuKL/PETAHUNAN	112,657	282177	9185577	PEKUNCEN	PETAHUNAN	SERAYU	Sub DAS Tajum					112,66
41	78311/PHR-HuKL/KALIWANGI	75,547	292773	9173981	PURWOJATI	KALIWANGI	SERAYU	Sub DAS Tajum			75,55		
42	78311/PHR-HuKL/KALIWANGI	50,998	288759	9174026	PURWOJATI	KALIWANGI	SERAYU	Sub DAS Tajum			51,00		
43	78368/PHR-HuKL/PURWOJATI	36,972	293411	9169917	PURWOJATI	PURWOJATI	SERAYU	Sub DAS Tajum				36,97	
44	78311/PHR-HuKL/KALIWANGI	44,168	289757	9173859	PURWOJATI	KALIWANGI	SERAYU	Sub DAS Tajum					44,17
45	78422/PHR-HuKL/KEMAWI	22,553	319665	9166842	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel			22,55		
46	78462/PHR-HuKL/TANGGERAN	18,140	315854	9165071	SOMAGEDE	TANGGERAN	IJO	Sub DAS Gatel			18,14		
47	78422/PHR-HuKL/KEMAWI	39,949	317897	9167428	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Kejawen				39,95	
48	78427/PHR-HuKL/KEMAWI	21,163	321458	9167580	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Gume-Piasa				21,16	
49	78443/PHR-HuKL/SOMAGEDE	21,375	316227	9167701	SOMAGEDE	SOMAGEDE	SERAYU	Sub DAS Kejawen				21,38	
50	78422/PHR-HuKL/PIASA KULON	19,175	319222	9167602	SOMAGEDE	PIASA KULON	SERAYU	Sub DAS Kejawen					19,18
51	78422/PHR-HuKL/KEMAWI	52,376	318510	9167247	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Kejawen					52,38
52	78422/PHR-HuKL/KEMAWI	50,572	319641	9167146	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Kejawen					50,57
53	78427/PHR-HuKL/KEMAWI	16,671	320054	9166785	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel					16,67

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	78443/PHR-HuKL/SOMAGEDE	25,178	315517	9167708	SOMAGEDE	SOMAGEDE	SERAYU	Sub DAS Kejawen					25,18
55	78458/PHR-HuKL/TANGGERAN	74,131	315192	9165345	SOMAGEDE	TANGGERAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen					74,13
56	78459/PHR-HuKL/KEMAWI	97,694	319345	9166154	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel					97,69
57	78310/PHR-HuKL/CIKAKAK	82,993	284546	9175145	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum			82,99		
58	78424/PHR-HuKL/RANDEGAN	57,468	280967	9165922	WANGON	RANDEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				57,47	
59	78424/PHR-HuKL/RANDEGAN	213,180	282179	9167061	WANGON	RANDEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				213,18	
60	78473/PHR-HuKL/RANDEGAN	48,713	281829	9165226	WANGON	RANDEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				48,71	
61	78481/PHR-HuKL/PANGADEGAN	34,722	288030	9163481	WANGON	PANGADEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				34,72	
62	78482/PHR-HuKL/PANGADEGAN	44,487	287775	9163586	WANGON	PANGADEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				44,49	
63	78333/PHR-HuKL/CIKAKAK	126,924	284508	9174074	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum					126,92
64	78361/PHR-HuKL/JURANGBAHAS	26,140	283739	9171145	WANGON	JURANGBAHAS	SERAYU	Sub DAS Tajum					26,14
65	78424/PHR-HuKL/RANDEGAN	92,326	281308	9166618	WANGON	RANDEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum					92,33
66	78424/PHR-HuKL/RANDEGAN	23,787	283668	9166327	WANGON	RANDEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum					23,79
67	78475/PHR-HuKL/PANGADEGAN	78,305	286726	9164085	WANGON	PANGADEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum					78,31
	Jumlah		3.594,88						0	0	970,46	1.326,85	1.297,57

Tabel 4.5. Sasaran Wilayah Penyusunan RP – RHL 2014 – 2018 untuk Kegiatan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi (Pembuatan Gully Plug)

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78396/GP-TgKB/PAPRINGAN	1	305.672	9.169.124	BANYUMAS	PAPRINGAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		1			
2	78396/GP-TgKB/PAPRINGAN	1	305.718	9.169.410	BANYUMAS	PAPRINGAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		1			
3	78396/GP-TgKB/PAPRINGAN	1	305.840	9.169.677	BANYUMAS	PAPRINGAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		1			
4	78396/GP-TgKB/PAPRINGAN	1	306.348	9.169.051	BANYUMAS	PAPRINGAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		1			
5	78413/GP-HuKL/BINANGUN	1	306.961	9.167.604	BANYUMAS	BINANGUN	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
6	78413/GP-HuKL/BINANGUN	1	307.147	9.168.139	BANYUMAS	BINANGUN	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
7	78413/GP-HuKL/BINANGUN	1	307.292	9.167.481	BANYUMAS	BINANGUN	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
8	78413/GP-HuKL/BINANGUN	1	307.338	9.167.876	BANYUMAS	BINANGUN	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
9	78413/GP-HuKL/BINANGUN	1	306.838	9.168.094	BANYUMAS	BINANGUN	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
10	78413/GP-HuKL/BINANGUN	1	306.521	9.168.008	BANYUMAS	BINANGUN	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
11	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	276.795	9.187.885	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
12	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	276.849	9.188.138	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
13	78144/GP-HuKL/SAMUDRA	1	279.938	9.188.364	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
14	78144/GP-HuKL/SAMUDRA	1	279.742	9.188.311	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
15	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	276.609	9.188.191	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
16	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	277.005	9.188.310	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
17	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	277.112	9.188.186	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
18	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	278.211	9.188.353	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
19	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	277.775	9.188.127	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
20	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	278.227	9.188.175	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS	1				

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Tajum					
21	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	277.772	9.187.933	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
22	78293/GP-HuKL/KARANGKEMOJING	1	278.613	9.177.500	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
23	78293/GP-HuKL/KARANGKEMOJING	1	278.861	9.177.548	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
24	78144/GP-HuKL/SAMUDRA	1	281.284	9.188.133	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
25	78144/GP-HuKL/SAMUDRA	1	281.297	9.188.690	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
26	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	276.361	9.186.932	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
27	78332/GP-HuKL/KARANGKEMOJING	1	281.485	9.175.966	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
28	78332/GP-HuKL/KARANGKEMOJING	1	281.511	9.175.700	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
29	78332/GP-HuKL/KARANGKEMOJING	1	281.454	9.175.461	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
30	78332/GP-HuKL/KARANGKEMOJING	1	281.489	9.176.136	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
31	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	276.458	9.186.735	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
32	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	277.188	9.186.536	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
33	78160/GP-HuKL/SAMUDRA	1	276.873	9.187.287	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
34	78332/GP-HuKL/KARANGKEMOJING	1	281.349	9.176.733	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
35	78407/GP-HuKB/KEBASEN	1	304.113	9.167.900	KEBASEN	KEBASEN	TIPAR	DAS Tipar Hulu		1			
36	78396/GP-TgKB/MANDIRANCAN	1	305.136	9.169.210	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		1			
37	78396/GP-TgKB/MANDIRANCAN	1	304.856	9.169.806	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		1			
38	78407/GP-TgKB/MANDIRANCAN	1	304.363	9.168.509	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		1			
39	78407/GP-TgKB/MANDIRANCAN	1	304.881	9.168.771	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		1			
40	78407/GP-TgKB/MANDIRANCAN	1	304.534	9.168.966	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen		1			

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	78396/GP-TgKB/MANDIRANCAN	1	305.840	9.169.677	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
42	78396/GP-TgKB/MANDIRANCAN	1	305.149	9.169.569	KEBASEN	MANDIRANCAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
43	78407/GP-TgKB/KEBASEN	1	304.765	9.168.400	KEBASEN	KEBASEN	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
44	78332/GP-HuKL/CIRAHAB	1	283.077	9.174.173	LUMBIR	CIRAHAB	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
45	78332/GP-HuKL/CIRAHAB	1	283.452	9.174.100	LUMBIR	CIRAHAB	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
46	78332/GP-HuKL/CIRAHAB	1	283.320	9.174.604	LUMBIR	CIRAHAB	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
47	78372/GP-TgKL/NOTOG	1	302.394	9.171.145	PATIKRAJA	NOTOG	SERAYU	Sub DAS Logawa			1		
48	78372/GP-TgKL/NOTOG	1	302.118	9.171.254	PATIKRAJA	NOTOG	SERAYU	Sub DAS Logawa			1		
49	78346/GP-TgKL/SAWANGAN WETAN	1	298.334	9.173.193	PATIKRAJA	SAWANGAN WETAN	SERAYU	Sub DAS Logawa				1	
50	78230/GP-HuKL/CIBANGKONG	1	285.742	9.182.445	PEKUNCEN	CIBANGKONG	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
51	78224/GP-HuKL/PETAHUNAN	1	282.611	9.185.643	PEKUNCEN	PETAHUNAN	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
52	78427/GP-HuKL/PIASA KULON	1	319.637	9.168.249	SOMAGEDE	PIASA KULON	SERAYU	Sub DAS Gume-Piasa	1				
53	78427/GP-HuKL/KEMAWI	1	320.581	9.167.783	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Gume-Piasa	1				
54	78427/GP-HuKL/KEMAWI	1	320.333	9.167.363	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Gume-Piasa	1				
55	78427/GP-HuKL/KEMAWI	1	321.347	9.166.903	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Gume-Piasa	1				
56	78427/GP-HuKL/KEMAWI	1	320.829	9.166.776	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Gume-Piasa	1				
57	78462/GP-HuKL/KEMAWI	1	317.815	9.166.173	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		1			
58	78427/GP-HuKL/KEMAWI	1	320.472	9.166.680	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		1			
59	78459/GP-HuKL/KEMAWI	1	319.748	9.166.273	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		1			
60	78443/GP-HuKL/SOMAGEDE	1	316.484	9.167.842	SOMAGEDE	SOMAGEDE	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
61	78443/GP-HuKL/SOMAGEDE	1	316.399	9.167.494	SOMAGEDE	SOMAGEDE	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
62	78443/GP-HuKL/SOMAGEDE	1	316.677	9.167.098	SOMAGEDE	SOMAGEDE	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	78443/GP-HuKL/SOMAGEDE	1	316.140	9.166.300	SOMAGEDE	SOMAGEDE	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
64	78443/GP-HuKL/SOMAGEDE	1	316.161	9.165.904	SOMAGEDE	SOMAGEDE	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
65	78422/GP-HuKL/KEMAWI	1	318.264	9.167.668	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
66	78422/GP-HuKL/KEMAWI	1	318.037	9.167.473	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
67	78422/GP-HuKL/KEMAWI	1	319.099	9.167.441	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
68	78422/GP-HuKL/KEMAWI	1	318.787	9.167.605	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
69	78422/GP-HuKL/PIASA KULON	1	319.088	9.167.953	SOMAGEDE	PIASA KULON	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
70	78422/GP-HuKL/KANDING	1	317.947	9.168.043	SOMAGEDE	KANDING	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
71	78422/GP-HuKL/KANDING	1	317.308	9.168.149	SOMAGEDE	KANDING	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
72	78422/GP-HuKL/KANDING	1	317.387	9.167.784	SOMAGEDE	KANDING	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
73	78443/GP-HuKL/KLINTING	1	317.350	9.166.902	SOMAGEDE	KLINTING	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
74	78458/GP- HuKL/TANGGERAN	1	314.946	9.165.576	SOMAGEDE	TANGGERAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
75	78458/GP- HuKL/TANGGERAN	1	314.677	9.164.800	SOMAGEDE	TANGGERAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
76	78458/GP- HuKL/TANGGERAN	1	314.703	9.165.069	SOMAGEDE	TANGGERAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
77	78422/GP-HuKL/KANDING	1	317.730	9.167.599	SOMAGEDE	KANDING	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
78	78422/GP-HuKL/KANDING	1	317.630	9.167.499	SOMAGEDE	KANDING	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
79	78422/GP-HuKL/KANDING	1	317.049	9.167.684	SOMAGEDE	KANDING	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
80	78443/GP-HuKL/KLINTING	1	316.681	9.167.097	SOMAGEDE	KLINTING	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
81	78443/GP-HuKL/KLINTING	1	316.985	9.167.066	SOMAGEDE	KLINTING	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
82	78443/GP-HuKL/KLINTING	1	317.155	9.166.543	SOMAGEDE	KLINTING	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
83	78443/GP-HuKL/KLINTING	1	317.456	9.166.654	SOMAGEDE	KLINTING	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	78460/GP-HuKL/TANGGERAN	1	314.556	9.166.680	SOMAGEDE	TANGGERAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
85	78460/GP-HuKL/TANGGERAN	1	314.434	9.166.205	SOMAGEDE	TANGGERAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
86	78460/GP-HuKL/TANGGERAN	1	314.027	9.166.295	SOMAGEDE	TANGGERAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
87	78519/GP-HuKL/KETANDA	1	318.596	9.163.413	SUMPIUH	KETANDA	IJO	Sub DAS Gatel	1				
88	78528/GP-HuKL/BANJARPANEPEN	1	319.174	9.162.345	SUMPIUH	BANJARPANEPEN	IJO	Sub DAS Gatel		1			
89	78528/GP-HuKL/BANJARPANEPEN	1	319.009	9.163.794	SUMPIUH	BANJARPANEPEN	IJO	Sub DAS Gatel		1			
90	78519/GP-HuKL/KETANDA	1	318.678	9.162.650	SUMPIUH	KETANDA	IJO	Sub DAS Gatel		1			
91	78493/GP-HuKL/WATUAGUNG	1	325.218	9.164.322	TAMBAK	WATUAGUNG	IJO	Sub DAS Tambak	1				
92	78493/GP-HuKL/WATUAGUNG	1	325.415	9.164.379	TAMBAK	WATUAGUNG	IJO	Sub DAS Tambak	1				
93	78470/GP-HuKL/WATUAGUNG	1	324.480	9.164.398	TAMBAK	WATUAGUNG	IJO	Sub DAS Tambak	1				
94	78493/GP-HuKL/WATUAGUNG	1	325.262	9.163.896	TAMBAK	WATUAGUNG	IJO	Sub DAS Tambak		1			
95	78524/GP-HuKL/WATUAGUNG	1	325.046	9.161.437	TAMBAK	WATUAGUNG	IJO	Sub DAS Tambak				1	
96	78524/GP-HuKL/WATUAGUNG	1	324.906	9.161.761	TAMBAK	WATUAGUNG	IJO	Sub DAS Tambak					1
97	78332/GP-HuKL/CIKAKAK	1	283.452	9.173.919	WANGON	CIKAKAK	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
	Jumlah	97							20	20	19	19	19

Tabel 4.6. Sasaran Wilayah Penyusunan RP – RHL 2014 – 2018 untuk Kegiatan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi (Pembuatan Dam Penahan)

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78310/DPn-HuKL/TIPAR KIDUL	1	283.297	9.176.603	AJIBARANG	TIPAR KIDUL	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
2	78302/DPn-HuKL/KARANGKEMOJING	1	280.331	9.176.750	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
3	78332/DPn-HuKL/KARANGKEMOJING	1	281.255	9.176.236	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
4	78234/DPn-HuKL/CILANGKAP	1	276.810	9.180.634	GUMELAR	CILANGKAP	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
5	78207/DPn-HuKL/CILANGKAP	1	276.465	9.182.258	GUMELAR	CILANGKAP	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
6	78144/DPn-HuKL/SAMUDRA	1	280.635	9.188.745	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
7	78234/DPn-HuKL/CIHONJE	1	277.154	9.180.875	GUMELAR	CIHONJE	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
8	78182/DPn-HuKB/SAMUDRA	1	278.223	9.186.486	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
9	78326/DPn-HuKL/KARANGKEMOJING	1	280.693	9.175.394	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
10	78190/DPn-HuKL/TLAGA	1	275.336	9.184.692	GUMELAR	TLAGA	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
11	78160/DPn-HuKL/SAMUDRA	1	278.791	9.188.509	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
12	78160/DPn-HuKL/SAMUDRA	1	276.961	9.187.434	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
13	78481/DPn-HuKL/GUNUNG WETAN	1	290.494	9.162.475	JATILAWANG	GUNUNG WETAN	SERAYU	Sub DAS Serayu Hilir	1				
14	78508/DPn-HuKL/PEKUNCEN	1	292.325	9.163.281	JATILAWANG	PEKUNCEN	SERAYU	Sub DAS Klawing	1				
15	78368/DPn-HuKL/TUNJUNG	1	291.519	9.169.718	JATILAWANG	TUNJUNG	SERAYU	Sub DAS Klawing					1
16	78461/DPn-HuKB/SAWANGAN	1	304.641	9.164.509	KEBASEN	SAWANGAN	TIPAR	DAS Tipar Hulu		1			
17	78509/DPn-HuKL/KARANGGINTUNG	1	317.811	9.163.074	KEMRANJEN	KARANGGINTUNG	IJO	Sub DAS Gatel					1
18	78370/DPn-HuKL/KARANGGAYAM	1	277.409	9.172.013	LUMBIR	KARANGGAYAM	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
19	78341/DPn-HuKL/KARANGGAYAM	1	278.297	9.172.896	LUMBIR	KARANGGAYAM	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
20	78224/DPn-HuKL/PETAHUNAN	1			PEKUNCEN	PETAHUNAN	SERAYU	Sub DAS					

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			282.632	9.185.121				Tajum			1		
21	78482/DPn-HuKL/PANGADEGAN	1	287.471	9.163.998	WANGON	PANGADEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
22	78473/DPn-HuKL/RAWAHENG	1	284.834	9.164.804	WANGON	RAWAHENG	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
23	78475/DPn-HuKL/PANGADEGAN	1	287.122	9.164.218	WANGON	PANGADEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
24	78424/DPn-HuKL/RANDEGAN	1	281.438	9.166.944	WANGON	RANDEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
25	78473/DPn-HuKL/RANDEGAN	1	281.859	9.165.332	WANGON	RANDEGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
26	78473/DPn-HuKL/RAWAHENG	1	283.441	9.165.036	WANGON	RAWAHENG	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
	Jumlah	26							6	5	5	5	5

4

Tabel 4.7. Sasaran Wilayah Penyusunan RP - RHL 2014 – 2018 untuk Kegiatan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi (Pembuatan Dam Pengendali)

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78302/DPi-HuKL/KARANGKEMOJING	1	279.927	9.177.416	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
2	78160/DPi-HuKL/SAMUDRA	1	277.438	9.186.319	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
3	78511/DPi-HuKB/KARANGSARI	1	307.353	9.162.779	KEBASEN	KARANGSARI	TIPAR	DAS Tipar Hulu				1	
4	78332/DPi-HuKL/CIRAHAB	1	282.115	9.174.009	LUMBIR	CIRAHAB	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
5	78459/DPi-HuKL/KEMAWI	1	319.050	9.166.289	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		1			
6	78460/DPi-HuKL/TANGGERAN	1	314.202	9.166.321	SOMAGEDE	TANGGERAN	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
7	78443/DPi-HuKL/SOMAGEDE	1	316.199	9.167.831	SOMAGEDE	SOMAGEDE	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
8	78528/DPi-HuKL/BANJARPANEPEN	1	319.165	9.163.483	SUMPIUH	BANJARPANEPEN	IJO	Sub DAS Gatel	1				
9	78519/DPi-HuKB/KETANDA	1	318.385	9.161.923	SUMPIUH	KETANDA	IJO	Sub DAS Gatel					1
	Jumlah	9							2	2	2	2	1

✓

Tabel 4.8. Sasaran Wilayah Penyusunan RP - RHL 2014 – 2018 untuk Kegiatan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi (Pembuatan Teras/SPA/Rorak)

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78284/T-SPA-Ro-HuKL/DARMAKRADENAN	50,146	281583	9179581	AJIBARANG	DARMAKRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	50,15				
2	78284/T-SPA-Ro-HuKL/DARMAKRADENAN	32,359	283202	9177858	AJIBARANG	DARMAKRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		32,36			
3	78310/T-SPA-Ro-HuKL/TIPAR KIDUL	82,390	283668	9176268	AJIBARANG	TIPAR KIDUL	SERAYU	Sub DAS Tajum		82,39			
4	78310/T-SPA-Ro-HuKL/DARMAKRADENAN	60,998	282992	9177025	AJIBARANG	DARMAKRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		61,00			
5	78243/T-Ro-HuKL/DARMAKRADENAN	23,063	284330	9181268	AJIBARANG	DARMAKRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			23,06		
6	78285/T-SPA-Ro-HuKL/DARMAKRADENAN	44,584	284078	9177773	AJIBARANG	DARMAKRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			44,58		
7	78311/T-SPA-Ro-HuKL/JINGKANG	15,921	289779	9176507	AJIBARANG	JINGKANG	SERAYU	Sub DAS Logawa			15,92		
8	78258/T-Ro-HuKL/BANJARSARI	42,607	291948	9178955	AJIBARANG	BANJARSARI	SERAYU	Sub DAS Logawa					42,61
9	78445/T-Ro-HuKL/BINANGUN	64,774	307363	9166949	BANYUMAS	BINANGUN	SERAYU	Sub DAS Kejawen				64,77	
10	78299/T-Ro-HuKL/JATISABA	27,470	296840	9176088	CILONGOK	JATISABA	SERAYU	Sub DAS Logawa			27,47		
11	78209/T-Ro-HuKL/SAMBIROTO	102,904	294272	9185909	CILONGOK	SAMBIROTO	SERAYU	Sub DAS Logawa				102,90	
12	78258/T-Ro-HuKL/BATUANTEN	55,379	292646	9177636	CILONGOK	BATUANTEN	SERAYU	Sub DAS Logawa				55,38	
13	78299/T-Ro-HuKL/PANUSUPAN	36,899	297255	9175633	CILONGOK	PANUSUPAN	SERAYU	Sub DAS Logawa					36,90
14	78144/T-SPA-Ro-HuKL/SAMUDRA	43,760	279576	9187729	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	43,76				
15	78160/T-SPA-Ro-HuKL/SAMUDRA	28,196	276684	9187881	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	28,20				
16	78176/T-SPA-Ro-HuKL/TLAGA	10,006	275651	9184978	GUMELAR	TLAGA	SERAYU	Sub DAS Tajum	10,01				
17	78182/T-SPA-Ro-HuKL/SAMUDRA	10,074	279339	9187255	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	10,07				
18	78182/T-SPA-Ro-HuKL/SAMUDRA	11,891	278819	9187814	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum	11,89				

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	78190/T-SPA-Ro-HuKL/CILANGKAP	14,437	275821	9182821	GUMELAR	CILANGKAP	SERAYU	Sub DAS Tajum	14,44				
20	78190/T-SPA-Ro-HuKL/TLAGA	59,396	274951	9184305	GUMELAR	TLAGA	SERAYU	Sub DAS Tajum	59,40				
21	78234/T-SPA-Ro-HuKL/CILANGKAP	118,593	276132	9180966	GUMELAR	CILANGKAP	SERAYU	Sub DAS Tajum	118,59				
22	78302/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGKEMOJING	109,721	280358	9176691	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum	109,72				
23	78326/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGKEMOJING	9,811	280554	9175845	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum	9,81				
24	78332/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGKEMOJING	3,797	281264	9176983	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum	3,80				
25	78160/T-SPA-Ro-HuKL/SAMUDRA	75,222	278884	9188395	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum		75,22			
26	78190/T-SPA-Ro-HuKL/TLAGA	0,075	274719	9183683	GUMELAR	TLAGA	SERAYU	Sub DAS Tajum		0,08			
27	78190/T-SPA-Ro-HuKL/TLAGA	8,019	275674	9184648	GUMELAR	TLAGA	SERAYU	Sub DAS Tajum		8,02			
28	78207/T-SPA-Ro-HuKL/CILANGKAP	79,959	276326	9182253	GUMELAR	CILANGKAP	SERAYU	Sub DAS Tajum		79,96			
29	78229/T-SPA-Ro-HuKL/CILANGKAP	49,659	274672	9182750	GUMELAR	CILANGKAP	SERAYU	Sub DAS Tajum		49,66			
30	78229/T-SPA-Ro-HuKL/TLAGA	18,451	275039	9183525	GUMELAR	TLAGA	SERAYU	Sub DAS Tajum		18,45			
31	78229/T-SPA-Ro-HuKL/TLAGA	1,421	275165	9183814	GUMELAR	TLAGA	SERAYU	Sub DAS Tajum		1,42			
32	78229/T-SPA-Ro-HuKL/CILANGKAP	20,435	274951	9183217	GUMELAR	CILANGKAP	SERAYU	Sub DAS Tajum			20,44		
33	78229/T-SPA-Ro-HuKL/CILANGKAP	29,621	275637	9182096	GUMELAR	CILANGKAP	SERAYU	Sub DAS Tajum			29,62		
34	78302/T-Ro-HuKL/PANINGKABAN	86,834	279837	9179238	GUMELAR	PANINGKABAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			86,83		
35	78160/T-Ro-HuKL/SAMUDRA	107,352	276680	9186746	GUMELAR	SAMUDRA	SERAYU	Sub DAS Tajum				107,35	
36	78224/T-Ro-HuKL/GANCANG	103,910	280813	9181727	GUMELAR	GANCANG	SERAYU	Sub DAS Tajum				103,91	
37	78207/T-Ro-HuKL/KEDUNGURANG	50,262	280388	9184649	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum					50,26

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	78332/T-Ro-HuKL/KARANGKEMOJING	93,158	281836	9175760	GUMELAR	KARANGKEMOJING	SERAYU	Sub DAS Tajum					93,16
39	78482/T-SPA-Ro-HuKL/GUNUNG WETAN	0,784	287748	9162814	JATI LAWANG	GUNUNG WETAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	0,78				
40	78481/T-SPA-Ro-HuKL/GUNUNG WETAN	33,168	288102	9163212	JATILA WANG	GUNUNG WETAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			33,17		
41	78368/T-Ro-HuKL/TUNJUNG	151,804	291816	9169704	JATI LAWANG	TUNJUNG	SERAYU	Sub DAS Tajum					151,80
42	78495/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGSARI	3,865	307132	9164291	KEBASEN	KARANGSARI	TIPAR	DAS Tipar Hulu		3,87			
43	78511/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGSARI	29,977	307596	9163938	KEBASEN	KARANGSARI	TIPAR	DAS Tipar Hulu		29,98			
44	78462/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGGINTUNG	3,471	317280	9164490	KEMRANJEN	KARANGGINTUNG	IJO	Sub DAS Gatel	3,47				
45	78509/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGSALAM	9,246	316681	9163899	KEMRANJEN	KARANGSALAM	IJO	Sub DAS Gatel	9,25				
46	78459/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGGINTUNG	11,877	317849	9164493	KEMRANJEN	KARANGGINTUNG	IJO	Sub DAS Gatel		11,88			
47	78462/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGSALAM	13,951	316688	9164470	KEMRANJEN	KARANGSALAM	IJO	Sub DAS Gatel		13,95			
48	78509/T-SPA-Ro-HuKL/KARANGGINTUNG	85,123	318097	9163411	KEMRANJEN	KARANGGINTUNG	IJO	Sub DAS Gatel		85,12			
49	78360/T-SPA-Ro-HuKL/CIDORA	9,948	277620	9169937	LUMBIR	CIDORA	SERAYU	Sub DAS Tajum	9,95				
50	78229/T-SPA-Ro-HuKL/DERMAJI	0,159	275494	9181507	LUMBIR	DERMAJI	SERAYU	Sub DAS Tajum		0,16			
51	78341/T-SPA-Ro-HuKL/CIDORA	20,778	277631	9173729	LUMBIR	CIDORA	SERAYU	Sub DAS Tajum		20,78			
52	78370/T-SPA-Ro-HuKL/CIDORA	8,068	277109	9170329	LUMBIR	CIDORA	SERAYU	Sub DAS Tajum		8,07			
53	78234/T-SPA-Ro-HuKL/DERMAJI	78,392	275326	9180743	LUMBIR	DERMAJI	SERAYU	Sub DAS Tajum			78,39		
54	78332/T-Ro-HuKL/CIRAHAB	129,823	282237	9173785	LUMBIR	CIRAHAB	SERAYU	Sub DAS Tajum			129,82		
55	78352/T-Ro-HuKL/CANDUK	67,037	280346	9171784	LUMBIR	CANDUK	SERAYU	Sub DAS Tajum			67,04		
56	78341/T-Ro-HuKL/CIDORA	110,469	276354	9173487	LUMBIR	CIDORA	SERAYU	Sub DAS Tajum					110,47

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	78424/T-Ro-HuKL/PARUNGKAMAL	141,431	281445	9168425	LUMBIR	PARUNGKAMAL	SERAYU	Sub DAS Tajum					141,43
58	78231/T-SPA-Ro-HuKL/TUMIYANG	66,318	292154	9188462	PEKUNCEN	TUMIYANG	SERAYU	Sub DAS Tajum		66,32			
59	78230/T-Ro-HuKL/CIBANGKONG	107,937	284981	9182175	PEKUNCEN	CIBANGKONG	SERAYU	Sub DAS Tajum			107,94		
60	78224/T-Ro-HuKL/PETAHUNAN	118,290	282313	9185577	PEKUNCEN	PETAHUNAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				118,29	
61	78164/T-Ro-HuKL/KARANGKEMIRI	133,202	284456	9187592	PEKUNCEN	KARANGKEMIRI	SERAYU	Sub DAS Tajum					133,20
62	78368/T-SPA-Ro-HuKL/PURWOJATI	25,057	293234	9171463	PURWOJATI	PURWOJATI	SERAYU	Sub DAS Tajum	25,06				
63	78368/T-SPA-Ro-HuKL/PURWOJATI	52,603	293225	9170656	PURWOJATI	PURWOJATI	SERAYU	Sub DAS Tajum	52,60				
64	78311/T-Ro-HuKL/KALIWANGI	75,547	292773	9173981	PURWOJATI	KALIWANGI	SERAYU	Sub DAS Tajum			75,55		
65	78311/T-Ro-HuKL/KALIWANGI	51,178	288759	9174016	PURWOJATI	KALIWANGI	SERAYU	Sub DAS Tajum				51,18	
66	78427/T-SPA-Ro-HuKL/KEMAWI	73,589	321192	9167272	SOMAGEDE	KEMAWI	SERAYU	Sub DAS Gume-Piasa	73,59				
67	78462/T-SPA-Ro-HuKL/KEMAWI	76,354	317790	9165918	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel	76,35				
68	78519/T-SPA-Ro-HuKL/KEMAWI	7,290	318724	9164536	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel	7,29				
69	78528/T-SPA-Ro-HuKL/KEMAWI	59,896	319371	9164745	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel	59,90				
70	78422/T-SPA-Ro-HuKL/KEMAWI	4,428	317955	9166820	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		4,43			
71	78427/T-SPA-Ro-HuKL/KEMAWI	64,223	320487	9166717	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		64,22			
72	78443/T-SPA-Ro-HuKL/KEMAWI	10,642	317814	9166505	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		10,64			
73	78455/T-SPA-Ro-HuKL/KEMAWI	0,757	320807	9166019	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel		0,76			
74	78459/T-SPA-Ro-HuKL/KEMAWI	199,242	319630	9165693	SOMAGEDE	KEMAWI	IJO	Sub DAS Gatel			199,24		
75	78422/T-Ro-HuKL/KANDING	150,713	317894	9167919	SOMAGEDE	KANDING	SERAYU	Sub DAS Kejawen				150,71	

Kecamatan	
6	
IAGEDE	SOMA
IPIUH	KETA
IPIUH	KETA
NGON	CIKA
NGON	CIKA
NGON	CIKA
NGON	CIKA
NGON	CIKA
NGON	RAND
NGON	CIKA

Tabel 4.9. Sasaran Wilayah Penyusunan RP – RHL 2014 – 2018 untuk Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Air
(Perlindungan Mata Air)

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78284/PMA-HuKL/DARMAKRADENAN	3,126	281.711	9.179.538	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
2	78248/PMA-HuKL/DARMAKRADENAN	3,126	283.775	9.180.834	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
3	78284/PMA-HuKB/DARMAKRADENAN	3,126	280.999	9.179.877	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
4	78285/PMA-HuKL/KARANGBAWANG	3,126	285.530	9.177.763	AJIBARANG	DARMA KRADENAN	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
5	78469/PMA-HuKB/KEJAWAR	3,126	313.080	9.166.547	BANYUMAS	KEJAWAR	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
6	78175/PMA-TgKB/KEMUTUG KIDUL	3,126	305.817	9.188.182	BATURADEN	KEMUTUG KIDUL	SERAYU	Sub DAS Klawing		1			
7	78175/PMA-TgKL/KEMUTUG LOR	3,126	304.863	9.189.303	BATURADEN	KEMUTUG LOR	SERAYU	Sub DAS Klawing			1		
8	78128/PMA-TgKL/KETENGER	3,126	304.066	9.190.827	BATURADEN	KETENGER	SERAYU	Sub DAS Logawa				1	
9	78299/PMA-HuKL/KASEGERAN	3,126	296.379	9.176.665	CILONGOK	KASEGERAN	SERAYU	Sub DAS Logawa			1		
10	78299/PMA-HuKL/JATISABA	3,126	296.809	9.176.328	CILONGOK	JATISABA	SERAYU	Sub DAS Logawa			1		
11	78299/PMA-HuKL/PANUSUPAN	3,126	298.001	9.175.894	CILONGOK	PANUSUPAN	SERAYU	Sub DAS Logawa			1		
12	78299/PMA-HuKL/PANUSUPAN	3,126	297.515	9.175.593	CILONGOK	PANUSUPAN	SERAYU	Sub DAS Logawa			1		
13	78258/PMA-HuKB/BATUANTEN	3,126	292.841	9.177.682	CILONGOK	BATUANTEN	SERAYU	Sub DAS Logawa					1
14	78195/PMA-HuKL/SOKAWERA	3,126	297.410	9.185.976	CILONGOK	SOKAWERA	SERAYU	Sub DAS Logawa					1
15	78224/PMA-HuKL/GANCANG	3,126	282.055	9.180.940	GUMELAR	GANCANG	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
16	78234/PMA-HuKL/CILANGKAP	3,126	276.314	9.180.994	GUMELAR	CILANGKAP	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
17	78224/PMA-HuKL/GANCANG	3,126	280.718	9.182.086	GUMELAR	GANCANG	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
18	78224/PMA-HuKL/KEDUNGURANG	3,126	281.715	9.184.430	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
19	78234/PMA-HuKL/PANINGKABAN	3,126	277.551	9.179.716	GUMELAR	PANINGKABAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	78176/PMA-HuKB/GUMELAR	3,126	277.158	9.185.015	GUMELAR	GUMELAR	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
21	78224/PMA-HuKL/KEDUNGURANG	3,126	282.234	9.183.232	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
22	78224/PMA-HuKL/KEDUNGURANG	3,126	283.037	9.183.613	GUMELAR	KEDUNGURANG	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
23	78368/PMA-HuKL/TUNJUNG	3,126	291.871	9.169.927	JATILAWANG	TUNJUNG	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
24	78481/PMA-HuKL/PEKUNCEN	3,126	291.455	9.163.120	JATILAWANG	PEKUNCEN	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
25	78481/PMA-HuKL/PEKUNCEN	3,126	291.530	9.163.467	JATILAWANG	PEKUNCEN	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
26	78508/PMA-HuKL/PEKUNCEN	3,126	292.224	9.163.083	JATILAWANG	PEKUNCEN	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
27	78250/PMA-TgKB/SUNYALANGU	3,126	298.599	9.186.330	KARANGLEWAS	SUNYALANGU	SERAYU	Sub DAS Logawa				1	
28	78461/PMA-HuKB/SAWANGAN	3,126	305.085	9.164.810	KEBASEN	SAWANGAN	TIPAR	DAS Tipar Hulu		1			
29	78461/PMA-HuKL/SAWANGAN	3,126	305.412	9.165.109	KEBASEN	SAWANGAN	TIPAR	DAS Tipar Hulu		1			
30	78495/PMA-HuKB/KALIWEDI	3,126	305.345	9.164.475	KEBASEN	KALIWEDI	TIPAR	DAS Tipar Hulu			1		
31	78450/PMA-HuKB/KALISALAK	3,126	305.242	9.165.786	KEBASEN	KALISALAK	TIPAR	DAS Tipar Hulu				1	
32	78495/PMA-HuKB/RANDEGAN	3,126	304.970	9.163.506	KEBASEN	RANDEGAN	TIPAR	DAS Tipar Hulu					1
33	78462/PMA-HuKL/KARANGSALAM	3,126	316.931	9.164.681	KEMRANJEN	KARANGSALAM	IJO	Sub DAS Gatel	1				
34	78370/PMA-HuKL/KARANGGAYAM	3,126	278.077	9.171.633	LUMBIR	KARANGGAYAM	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
35	78352/PMA-HuKL/CANDUK	3,126	280.636	9.172.923	LUMBIR	CANDUK	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
36	78332/PMA-HuKL/CIRAHAB	3,126	283.530	9.174.289	LUMBIR	CIRAHAB	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
37	78169/PMA-TgKL/KRAJAN	3,126	288.574	9.189.571	PEKUNCEN	KRAJAN	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
38	78164/PMA-HuKL/KRANGGAN	3,126	286.531	9.187.101	PEKUNCEN	KRANGGAN	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
39	78224/PMA-HuKL/SEMEDO	3,126	284.705	9.185.521	PEKUNCEN	SEMEDO	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
40	78230/PMA-HuKL/PETAHUNAN	3,126	284.909	9.184.435	PEKUNCEN	PETAHUNAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	

No	UTP-RHL	Luas	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	78224/PMA-HuKL/PETAHUNAN	3,126	282.250	9.185.776	PEKUNCEN	PETAHUNAN	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
42	78211/PMA-HuKB/TUMIYANG	3,126	291.280	9.185.452	PEKUNCEN	TUMIYANG	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
43	78311/PMA-HuKL/KALIWANGI	3,126	293.405	9.174.222	PURWOJATI	KALIWANGI	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
44	78368/PMA-HuKL/PURWOJATI	3,126	293.341	9.170.074	PURWOJATI	PURWOJATI	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
45	78422/PMA-HuKL/KANDING	3,126	317.178	9.168.379	SOMAGEDE	KANDING	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
46	78422/PMA-HuKL/PIASA KULON	3,126	319.087	9.168.374	SOMAGEDE	PIASA KULON	SERAYU	Sub DAS Kejawen					1
47	78528/PMA-HuKL/BANJARPANEPEN	3,126	321.110	9.163.359	SUMPIUH	BANJARPANEPEN	IJO	Sub DAS Gatel	1				
48	78528/PMA-HuKL/BANJARPANEPEN	3,126	320.113	9.161.558	SUMPIUH	BANJARPANEPEN	IJO	Sub DAS Gatel	1				
49	78519/PMA-HuKL/KETANDA	3,126	318.449	9.163.348	SUMPIUH	KETANDA	IJO	Sub DAS Gatel	1				
50	78470/PMA-HuKL/WATUAGUNG	3,126	324.538	9.164.494	TAMBAK	WATUAGUNG	IJO	Sub DAS Tambak	1				
51	78524/PMA-HuKL/WATUAGUNG	3,126	325.086	9.162.085	TAMBAK	WATUAGUNG	IJO	Sub DAS Tambak				1	
52	78473/PMA-HuKL/RAWAHENG	3,126	285.922	9.165.016	WANGON	RAWAHENG	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
	Jumlah	162,552 ha atau 52 titik							11	10	11	10	10

Tabel 4.10. Sasaran Wilayah Penyusunan RP - RHL 2014 – 2018 untuk Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Air (Pembuatan Sumur Resap)

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78285/SRA-HuKL/Karangbawang	1	285.558	9.177.793	AJIBARANG	Karangbawang	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
2	78258/SRA-HuKB/Jingkang	1	291.893	9.177.318	AJIBARANG	Jingkang	SERAYU	Sub DAS Logawa					1
3	78234/SRA-HuKL/Dermaji	1	275.395	9.180.514	GUMELAR	Dermaji	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
4	78234/SRA-HuKL/Paningkaban	1	278.690	9.179.613	GUMELAR	Paningkaban	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
5	78224/SRA-HuKL/Samudra	1	280.108	9.186.538	GUMELAR	Samudra	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
6	78481/SRA-HuKL/Pekuncen	1	291.557	9.163.533	JATILAWANG	Pekuncen	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
7	78481/SRA-HuKL/Gunungwetan	1	290.188	9.162.542	JATILAWANG	Gunungwetan	SERAYU	Sub DAS Serayu Hilir		1			
8	78413/SRA-TgKB/Binangun	1	306.154	9.168.502	KEBASEN	Binangun	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
9	78175/SRA-HuKL/Karangsalam	1	305.935	9.189.383	KEMRANJEN	Karangsalam	SERAYU	Sub DAS Gatel		1			
10	78459/SRA-HuKL/Karanggintung	1	317.587	9.164.508	KEMRANJEN	Karanggintung	SERAYU	Sub DAS Gatel			1		
11	78505/SRA-HuKL/Karangsalam	1	314.995	9.163.807	KEMRANJEN	Karangsalam	SERAYU	Sub DAS Gatel				1	
12	78352/SRA-HuKL/Canduk	1	280.444	9.172.859	LUMBIR	Canduk	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
13	78475/SRA-HuKL/Karangkemiri	1	285.640	9.163.361	PEKUNCEN	Karangkemiri	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
14	78224/SRA-HuKL/Semendo	1	284.296	9.186.128	PEKUNCEN	Semendo	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
15	78164/SRA-HuKL/Karangkemiri	1	285.009	9.187.660	PEKUNCEN	Karangkemiri	SERAYU	Sub DAS Tajum				1	
16	78311/SRA-HuKL/Kalitapen	1	289.237	9.174.843	PURWOJATI	Kalitapen	SERAYU	Sub DAS Tajum		1			
17	78357/SRA-HuKB/Kaliwangi	1	292.155	9.173.187	PURWOJATI	Kaliwangi	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
18	78357/SRA-HuKB/Klapasawit	1	293.155	9.173.474	PURWOJATI	Klapasawit	SERAYU	Sub DAS Tajum					1
19	78459/SRA-HuKL/Kemawi	1	319.698	9.166.484	SOMAGEDE	Kemawi	SERAYU	Sub DAS Gatel	1				

No	UTP-RHL	Unit	Koordinat		Kecamatan	Desa	DAS	Sub DAS	Sebaran Tahun				
			X	Y					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	78443/SRA-HuKL/Klinting	1	317.190	9.166.239	SOMAGEDE	Klinting	SERAYU	Sub DAS Kejawen			1		
21	78422/SRA-HuKL/Kanding	1	318.085	9.168.333	SOMAGEDE	Kanding	SERAYU	Sub DAS Kejawen				1	
22	78528/SRA-HuKL/Kebokura	1	320.517	9.161.097	SUMPIUH	Kebokura	SERAYU	Sub DAS Gatel	1				
23	78528/SRA- HuKL/Banjarpanepen	1	319.124	9.161.696	SUMPIUH	Banjarpanepen	SERAYU	Sub DAS Gatel	1				
24	78518/SRA-HuKB/Ketanda	1	321.893	9.161.257	SUMPIUH	Ketanda	SERAYU	Sub DAS Gatel					1
25	78524/SRA-HuKB/Watuagung	1	324.646	9.161.536	TAMBAK	Watuagung	SERAYU	Sub DAS Gatel					1
26	78475/SRA-HuKL/Pangadegan	1	286.049	9.164.115	WANGON	Pangadegan	SERAYU	Sub DAS Tajum	1				
27	78473/SRA-HuKL/Rawaheng	1	283.787	9.164.640	WANGON	Rawaheng	SERAYU	Sub DAS Tajum			1		
	Jumlah	27							6	6	5	5	5

✓

V. RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

A. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tiap Fungsi Hutan dan Lahan

1. Perencanaan RHL

Perencanaan RHL yang tertuang dalam dokumen RP-RHL periode tahun 2014 – 2018 (5 tahun) ini di fokuskan pada fungsi hutan yang masuk dalam “Kawasan Budidaya” dan “Kawasan Lindung di Luar Hutan”. Fungsi Hutan yang termasuk kategori Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung di Luar Hutan ini pada tingkat lapangan terwujud dalam bentuk “Hutan Rakyat, Hutan Milik, Hutan Hak, Ruang Terbuka Hijau, Sempadan Sungai, Kanan – Kiri Waduk/Situ, dan bentuk pemanfaatan lainnya yang dicirikan dengan adanya vegetasi dominan berupa pohon – pohonan/kayu – kayuan.

Luasan kegiatan pemulihan hutan dan lahan dalam bentuk pembuatan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Hutan Rakyat pada periode 2014 – 2018 dari hasil pengolahan data spasial RTk-RHL diperoleh luas sekitar 6.670,42 ha. Luasan ini akan dibagi habis dalam waktu 5 tahun secara merata. Dalam perencanaan RHL ini perlu dilakukan pemilihan terhadap UTP prioritas pada tahun – tahun awal. Hal ini supaya UTP yang masuk kategori Sangat Kritis/Kritis dapat segera tertangani dengan kegiatan RHL. Penentuan urutan UTP prioritas didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. UTP dengan kategori Sangat Kritis didahulukan, dilanjutkan dengan yang kategori Kritis dan terakhir Agak Kritis. Untuk kondisi lahan yang terkategori Potensial Kritis dan Tidak Kritis untuk sementara waktu tidak diberikan perlakuan apapun.
- b. UTP pada Kawasan Lindung di Luar Hutan lebih didahulukan daripada UTP yang berada pada Kawasan Budidaya.
- c. UTP yang berada di Hulu akan didahulukan, diikuti dengan yang di Tengah, dan terakhir di bagian Hilir.
- d. UTP dengan luasan lebih dari 25 ha akan didahulukan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan UTP yang memiliki luasan < 25 ha.

Penentuan urutan UTP seperti tersebut di atas didasarkan pada kondisi ideal, pada tingkat lapangan akan dilakukan beberapa penyesuaian seperti pemerataan kegiatan di lokasi wilayah dan beberapa pertimbangan lainnya. Untuk kegiatan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi serta Pengembangan Sumberdaya Air, kategori pemilihan UTP prioritas dalam kurun waktu 5 tahun sama dengan metode pemilihan UTP dalam kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan.

2. Organisasi

Organisasi yang terlibat dalam kegiatan RHL dalam jangka waktu 5 tahun (2014 -2018) terdiri dari :

- Kelompok Tani Hutan Rakyat sesuai dengan administrasi UTP terpilih
- Penyuluh Kehutanan di Kabupaten Banyumas



- Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas
- BPDAS Serayu Opak Progo
- Forum DAS Kabupaten Banyumas

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan RHL di Kabupaten Banyumas pada tiap tahunnya akan mengacu pada dokumen RTn-RHL yang disusun pada T-1 (satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan). Pelaksanaan RHL akan didasarkan pada UTP terpilih berdasarkan kriteria prioritas. Seperti yang tercantum dalam pengertian pada bab di depan bahwa Unit Terkecil Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (UTP RHL) adalah unit satuan terkecil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang mengandung informasi kode mikro watershed, perlakuan RHL, morfologi DAS, kategori kawasan, dan informasi administrasi wilayah (desa).

Berikut ini contoh beberapa UTP terpilih yang menjadi sasaran RHL Kabupaten Banyumas periode 2104 – 2018 :

Tabel 5.1. Contoh UTP-RHL periode 2014 - 2018

No	LMU	UTP RHL	Luas (ha)	Kegiatan
1	KHuLI	78190/HR-HuKL/CILANGKAP	14.437	HR
2	KHuLI	78190/HR-HuKL/TLAGA	27.008	HR
3	KHuLI	78182/HR-HuKL/SAMUDRA	42.543	HR
4	SKHuLI	78182/HR-HuKL/SAMUDRA	11.647	HR
5	AKHuBI	78160/GP-HuKB/SAMUDRA	0.008	GP
6	AKHuBI	78160/DPn-HuKB/SAMUDRA	0.031	DPn
7	KHuLI	78302/DPi-HuKL/KARANGKEMOJING	0.070	DPi
8	AKHuB	78176/PMA-HuKB/GUMELAR	2.158	Perlindungan Mata Air



Kondisi UTP RHL di Kabupaten Banyumas dapat terdiri dari :

- Terdiri dari satu atau lebih LMU, sehingga dalam UTP RHL tersebut akan terdapat beberapa perlakuan/kegiatan RHL. Contoh UTP nomor 78182/HR-HuKL/SAMUDRA dan 78182/HR-HuKL/SAMUDRA dengan kondisi LMU KHuLI dan SKHuLI.
- Berada pada satu atau lebih wilayah administratif desa/kecamatan, sehingga UTP RHL tersebut ditangani oleh dua wilayah administratif desa atau lebih. Contoh UTP nomor 78190/HR-HuKL/CILANGKAP dan 78190/HR-HuKL/TLAGA.

Pelaksanaan RHL pada tingkat lapangan akan dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Rakyat dengan didampingi oleh petugas dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan atau dari Penyuluh Kehutanan di wilayah setempat. Untuk kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan, bentuk kegiatan RHLnya adalah Hutan Rakyat dan Pengkayaan Hutan Rakyat.

Kegiatan Hutan Rakyat diutamakan pada daerah dengan kondisi sebagai berikut :

- Memiliki identitas UTP sesuai dengan rekomendasi, misalkan 78207/HR-HuKL/CIHONJE.
- Merupakan daerah dengan kategori LMU Sangat Kritis dan Kritis, Morfologi DAS ada di Hulu dan Tengah dengan kategori kawasan “Lindung di Luar Kawasan Hutan dan Budidaya”, misalkan KHuLI (Kritis, Hulu, Lindung, Prioritas I).

Adapun untuk kegiatan Pengkayaan Hutan Rakyat pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan lokasi dan pelaksanaan pada tingkat lapangan adalah :

- Memiliki identitas UTP sesuai dengan rekomendasi, misalkan 78195/PHR-TgKB/SOKAWERA
- Merupakan daerah dengan kategori LMU Agak Kritis, Morfologi DAS ada di Hulu atau Tengah dengan kategori kawasan “Budidaya”, misalkan AKHuBII (Agak Kritis, Hulu, Budidaya, Prioritas II).

Untuk kegiatan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi serta Pengembangan Sumberdaya Air pertimbangannya hampir sama dengan kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan.

4. Pengendalian

Pengendalian RHL di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengendalian ini dilakukan bersama – sama antara Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Penyuluh Kehutanan setempat dan Kelompok Tani Pelaksana. Acuan yang dipakai dalam pengendalian kegiatan RHL adalah Dokumen RP-RHL dan RTn-RHL pada tahun yang bersangkutan. Dalam kegiatan pengendalian ini diupayakan agar lokasi RHL tetap pada UTP yang direkomendasikan atau yang tercantum dalam dokumen RTn-RHL.

B. Rencana Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Selain kegiatan utama berupa kegiatan fisik rehabilitasi hutan dan lahan, pada pelaksanaannya diperlukan kegiatan pendukung. Dalam hal ini kegiatan pendukung bertujuan untuk lebih memperkuat kondisi organisasi pelaksana kegiatan (baik instansi pelaksana maupun stakeholder lainnya).

Kondisi organisasi pelaksana kegiatan merupakan salah satu modal penting dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran instansi terkait baik yang langsung maupun tidak langsung juga sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan RHL. Apabila unsur-unsur yang nantinya akan terlibat dalam kegiatan RHL dirasakan memiliki kualitas pengetahuan dan keterampilan yang kurang, maka harus dirumuskan rencana peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan kepada semua unsur tersebut.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui kegiatan :

- Pelatihan, baik pelatihan teknis, kelembagaan maupun administrasi
Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah teknis, kelembagaan, dan administrasi RHL. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) kelompok pelatihan, yaitu pelatihan teknis, kelembagaan dan administrasi. Pelatihan diberikan kepada semua pelaku RHL, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan.

- Pendampingan

Pendampingan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan kelompok pelaksana RHL dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan kemampuan teknis dan administrasi, pengembangan usaha, pengembangan teknologi, perluasan akses pasar, serta pembinaan kelompok. Kegiatan pendampingan kelompok antara lain terdiri dari pengembangan organisasi kelompok, penyusunan rencana RHL, pelaksanaan kegiatan RHL,



penyelenggaraan administrasi kelompok dan administrasi proyek, dan lain-lain.

- **Penyuluhan**

Penyuluhan merupakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat menjadi pihak yang peduli terhadap kelestarian fungsi hutan dan lahan. Penyuluhan harus dilakukan secara berkesinambungan, karena perubahan perilaku tidak dapat serta merta terjadi, tetapi melalui proses yang secara umum terdiri dari tahu, mau dan mampu melakukan pelestarian/konservasi hutan dan lahan melalui kegiatan RHL.

Sasaran penyuluhan adalah seluruh masyarakat yang hidup dan kehidupannya terkait dengan pelestarian hutan dan lahan, baik yang berifat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan RHL. Penyuluhan dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain latihan, kunjungan lapangan, ceramah, pameran, penyebaran brosur / leaflet / majalah, kampanye, lomba, temu wicara, diskusi kelompok, dan sebagainya

C. Rencana Pengembangan Kelembagaan

Proyeksi pengembangan kelembagaan RHL 5 (lima) tahun ke depan meliputi penyiapan tenaga pelaksana dan pengendalian kegiatan RHL (baik aparat maupun masyarakat), penyiapan organisasi pemerintahan/masyarakat/ kelompok tani, penyiapan kelembagaan antar *stakeholders*, dan perumusan tata hubungan kerja antar unit kerja dan pelaksanaannya. Pada dasarnya pengembangan kelembagaan diarahkan kepada organisasi, sumberdaya manusia, kewenangan serta tata

hubungan kerja dalam setiap dimensi penyelenggaraan program RHL yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian.

Apabila berdasarkan identifikasi kelembagaan tersebut dinilai masih relatif lemah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan yang ada. Kelembagaan dimaksud baik kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kelembagaan dijabarkan untuk tiap tahun selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlakunya RPRHL, dengan jenis kegiatan sesuai dengan Rencana Pengembangan Kelembagaan yang tertuang dalam RTk-RHL DAS.

D. Monitoring dan Evaluasi RHL

Kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan/evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam menentukan rencana monitoring dan evaluasi yang perlu ditetapkan adalah :

- a. Tim / pelaksana monitoring dan evaluasi;
- b. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- c. Sasaran monitoring dan evaluasi;
- d. Metode monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan;
- e. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.

Monitoring dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan RHL. Unsur-unsur yang dimonitoring meliputi kemajuan atau perkembangan fisik pekerjaan antara lain fisik tanaman, bangunan konservasi tanah, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan RHL. Di samping itu juga untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul

dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai hasil akhir kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan rencana kegiatan di masa mendatang. Evaluasi untuk setiap kegiatan dilakukan oleh Tim Evaluasi dengan sasaran kegiatan tahun berjalan, pemeliharaan dan pasca proyek. Kegiatan yang dievaluasi meliputi :

- a. Penilaian tanaman : kesesuaian dengan rancangan teknis, luas tanaman, jumlah dan jenis tanaman, persentase tumbuh tanaman sehat dan keberhasilan.
- b. Penilaian bangunan konservasi tanah : kesesuaian dengan rancangan teknis, jumlah bangunan, kondisi (baik/rusak), fungsi bangunan (berfungsi / kurang berfungsi / tidak berfungsi).

E. Rencana Pembiayaan

Besarnya anggaran RHL lima tahun terakhir (dari berbagai sumber anggaran) beserta realisasinya merupakan salah satu masukan dalam merencanakan jumlah anggaran yang disiapkan untuk lima tahun berikutnya. Dengan melihat jumlah serta realisasi penyerapan dana, maka dapat diketahui kemampuan suatu instansi / satker dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga dalam merencanakan anggaran lebih realistis sesuai dengan kemampuan penyerapan pada tahun-tahun sebelumnya.

Rencana biaya pada dasarnya merupakan terjemahan dari input menjadi unit uang dengan menggunakan satuan biaya (*unit cost*) yang

berlaku serta asumsi-asumsi tertentu. Satuan biaya yang digunakan sejauh mungkin didasarkan pada hasil studi lapangan pada waktu dan tempat tertentu dan / atau ketetapan instansi-instansi yang berwenang.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan RHL harus didukung dengan biaya yang cukup untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan yang cermat agar sumber daya yang dibutuhkan selalu tersedia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya di dalam kawasan hutan lindung dan produksi serta di luar kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian pembiayaan kegiatan RHL lebih ditekankan menggunakan APBD. Selain itu pembiayaan kegiatan RHL juga dapat berasal dari APBN, DBH DR, DAK Bidang Kehutanan, dan lain-lain termasuk pembiayaan RHL secara swadaya masyarakat maupun kemitraan.

Secara umum perhitungan kebutuhan biaya dalam kegiatan RHL selama 5 tahun ke depan menggunakan standar “Ancar – Ancar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pembangunan Bidang PDAS PS yang diterbitkan oleh Ditjen BPDASPS Kementerian Kehutanan Nomor P.2/V-SET/2013, dengan dikombinasi dengan Daftar Indeks Belanja Bupati Banyumas pada tahun sekarang. Berikut ini Harga Satuan Pokok RHL di Kabupaten Banyumas untuk proyeksi 5 tahun kedepan, berdasarkan HSPK Tahun 2013 dari Kementerian Kehutanan.

- Hutan Rakyat = Rp. 2.625.000,- per hektar
- Pengkayaan Hutan Rakyat = Rp. 1.245.000,- per hektar
- Gully Plug = 5.000.000,- per unit
- Dam Penahan = 24.322.000,- per unit
- Dam Pengendali = 168.575.000,- per unit
- Pembuatan Teras/SPA/Rorak = 1.250.000,- per hektar
- Perlindungan Mata Air = Rp. 2.500.000,- per hektar
- Pembuatan Sumur Resap = Rp.3.660.000, -/Unit

Selanjutnya untuk rincian biaya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk setiap jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2. Rencana Biaya RHL Pemulihan Hutan dan Lahan (Hutan Rakyat)

No	Kecamatan	Kegiatan	Luas (ha)	Satuan (x Rp.1000,00)	Biaya (x Rp.1000,00)
1	AJIBARANG	Pembuatan HR	480,46	2.625	1.261.205
2	BANYUMAS	Pembuatan HR	39,88	2.625	104.672
3	BATURADEN	Pembuatan HR	49,92	2.625	131.048
4	GUMELAR	Pembuatan HR	753,61	2.625	1.978.224
5	JATILAWANG	Pembuatan HR	261,57	2.625	686.621
6	KARANGLEWAS	Pembuatan HR	8,08	2.625	21.202
7	KEBASEN	Pembuatan HR	301,84	2.625	792.327
8	KEMRANJEN	Pembuatan HR	127,509	2.625	334.711
9	LUMBIR	Pembuatan HR	107,886	2.625	283.201
10	PEKUNCEN	Pembuatan HR	86,921	2.625	228.168
11	SOMAGEDE	Pembuatan HR	461,786	2.625	1.212.188
12	SUMBANG	Pembuatan HR	40,227	2.625	105.596
13	SUMPIUH	Pembuatan HR	47,45	2.625	124.556
14	WANGON	Pembuatan HR	308,41	2.625	809.576
	Jumlah		3.075,54		8.073.295

✓

Tabel 5.3. Rencana Biaya RHL Pemulihan Hutan dan Lahan (Pengkayaan Hutan Rakyat)

No	Kecamatan	Kegiatan	Luas (ha)	Satuan (x Rp.1000,00)	Biaya (x Rp.1000,00)
1	AJIBARANG	Pengkayaan HR	125,77	1.245	156.586
2	BANYUMAS	Pengkayaan HR	64,72	1.245	80.571
3	CILONGOK	Pengkayaan HR	40,40	1.245	50.293
4	GUMELAR	Pengkayaan HR	844,34	1.245	1.051.197
5	JATILAWANG	Pengkayaan HR	92,16	1.245	114.740
6	KEBASEN	Pengkayaan HR	51,66	1.245	64.312
7	KEMRANJEN	Pengkayaan HR	58,46	1.245	72.779
8	LUMBIR	Pengkayaan HR	343,84	1.245	428.085
9	PEKUNCEN	Pengkayaan HR	477,84	1.245	594.907
10	PURWOJATI	Pengkayaan HR	207,69	1.245	258.568
11	SOMAGEDE	Pengkayaan HR	458,98	1.245	571.426
12	WANGON	Pengkayaan HR	829,05	1.245	1.032.161
	Jumlah		3.594,88		4.475.626

✓

Tabel 5.4. Rencana Biaya RHL Pengendalian Erosi dan Sedimentasi (Gully Plug)

No	Kecamatan	Kegiatan	Unit	Satuan (x Rp.1000,00)	Biaya (x Rp.1000,00)
1	BANYUMAS	Gully Plug	10	5.000	50.000
2	GUMELAR	Gully Plug	24	5.000	120.000
3	KEBASEN	Gully Plug	9	5.000	45.000
4	LUMBIR	Gully Plug	3	5.000	15.000
5	PATIKRAJA	Gully Plug	3	5.000	15.000
6	PEKUNCEN	Gully Plug	2	5.000	10.000
7	SOMAGEDE	Gully Plug	35	5.000	175.000
8	SUMPIUH	Gully Plug	4	5.000	20.000
9	TAMBAK	Gully Plug	6	5.000	30.000
10	WANGON	Gully Plug	1	5.000	5.000
	Jumlah		97		485.000

Tabel 5.5. Rencana Biaya RHL Pengendalian Erosi dan Sedimentasi (Dam Penahan)

No	Kecamatan	Kegiatan	Unit	Satuan (x Rp.1000,00)	Biaya (x Rp.1000,00)
1	AJIBARANG	Dam Penahan	1	24.322	24.322
2	GUMELAR	Dam Penahan	11	24.322	267.542
3	JATILAWANG	Dam Penahan	3	24.322	72.966
4	KEBASEN	Dam Penahan	1	24.322	24.322
5	KEMRANJEN	Dam Penahan	1	24.322	24.322
6	LUMBIR	Dam Penahan	2	24.322	48.644
7	PEKUNCEN	Dam Penahan	1	24.322	24.322
8	WANGON	Dam Penahan	6	24.322	145.932
	Jumlah		26		632.372

✓

Tabel 5.6. Rencana Biaya RHL Pengendalian Erosi dan Sedimentasi (Dam Pengendali)

No	Kecamatan	Kegiatan	Unit	Satuan (x Rp.1000,00)	Biaya (x Rp.1000,00)
1	GUMELAR	Dam Pengendali	2	168.575	337.150
2	KEBASEN	Dam Pengendali	1	168.575	168.575
3	LUMBIR	Dam Pengendali	1	168.575	168.575
4	SOMAGEDE	Dam Pengendali	3	168.575	505.725
5	SUMPIUH	Dam Pengendali	2	168.575	337.150
	Jumlah		9		1.517.175

Tabel 5.7. Rencana Biaya RHL Pembuatan Teras/SPA/Rorak

No	Kecamatan	Kegiatan	Luas	Satuan (x Rp.1000,00)	Biaya (x Rp.1000,00)
1	AJIBARANG	Pembuatan teras/SPA/Rorak	352,07	1250	440.085
2	BANYUMAS	Pembuatan teras/SPA/Rorak	64,77	1250	80.968
3	CILONGOK	Pembuatan teras/SPA/Rorak	222,65	1250	278.315
4	GUMELAR	Pembuatan teras/SPA/Rorak	1.144,06	1250	1.430.075
5	JATILAWANG	Pembuatan teras/SPA/Rorak	185,76	1250	232.195
6	KEBASEN	Pembuatan teras/SPA/Rorak	33,84	1250	42.303
7	KEMRANJEN	Pembuatan teras/SPA/Rorak	123,67	1250	154.585
8	LUMBIR	Pembuatan teras/SPA/Rorak	566,11	1250	707.631
9	PEKUNCEN	Pembuatan teras/SPA/Rorak	425,75	1250	532.184
10	PURWOJATI	Pembuatan teras/SPA/Rorak	204,39	1250	255.481
11	SOMAGEDE	Pembuatan teras/SPA/Rorak	782,60	1250	978.255
12	SUMPIUH	Pembuatan teras/SPA/Rorak	54,88	1250	68.605

No	Kecamatan	Kegiatan	Luas	Satuan (x Rp.1000,00)	Biaya (x Rp.1000,00)
13	WANGON	Pembuatan teras/SPA/Rorak	599,89	1250	749.858
	Jumlah		4.760,4 3		5.950.539

Tabel 5.8. Rencana Biaya RHL Pengembangan Sumber Mata Air
(Perlindungan Mata Air)

No	Kecamatan	Kegiatan	Luas	Satuan (x Rp.1000,00)	Biaya (x Rp.1000,00)
1	AJIBARANG	Perlindungan Mata Air	12,504	2.500	31260
2	BANYUMAS	Perlindungan Mata Air	3,126	2.500	7815
3	BATURADEN	Perlindungan Mata Air	9,378	2.500	23445
4	CILONGOK	Perlindungan Mata Air	18,756	2.500	46890
5	GUMELAR	Perlindungan Mata Air	25,008	2.500	62520
6	JATILAWANG	Perlindungan Mata Air	12,504	2.500	31260
7	KARANGLEWAS	Perlindungan Mata Air	3,126	2.500	7815
8	KEBASEN	Perlindungan Mata Air	15,630	2.500	39075
9	KEMRANJEN	Perlindungan Mata Air	3,126	2.500	7815
10	LUMBIR	Perlindungan Mata Air	9,378	2.500	23445
11	PEKUNCEN	Perlindungan Mata Air	18,756	2.500	46890
12	PURWOJATI	Perlindungan Mata Air	6,252	2.500	15630
13	SOMAGEDE	Perlindungan Mata Air	6,252	2.500	15630
14	SUMPIUH	Perlindungan Mata Air	9,378	2.500	23445
15	TAMBAK	Perlindungan Mata Air	6,252	2.500	15630
16	WANGON	Perlindungan Mata Air	3,126	2.500	7815
	Jumlah		162,552		406.380,000

Tabel 5.9.Rencana Biaya RHL Pembuatan Sumur Resap

No	Kecamatan	Kegiatan	Unit	Satuan (x Rp.1000,00)	Biaya (x Rp.1000,00)
1	AJIBARANG	Sumur Resap	2	3.660	7.320
3	GUMELAR	Sumur Resap	3	3.660	10.980
6	JATILAWANG	Sumur Resap	2	3.660	7.320
8	KEBASEN	Sumur Resap	1	3.660	3.660
9	KEMRANJEN	Sumur Resap	3	3.660	10.980
12	LUMBIR	Sumur Resap	1	3.660	3.660
13	PEKUNCEN	Sumur Resap	3	3.660	10.980
16	PURWOJATI	Sumur Resap	3	3.660	10.980
19	SOMAGEDE	Sumur Resap	3	3.660	10.980
22	SUMPIUH	Sumur Resap	3	3.660	10.980
25	TAMBAK	Sumur Resap	1	3.660	3.660
26	WANGON	Sumur Resap	2	3.660	7.320
	Jumla		27		98.820

Tabel 5.10. Rekapitulasi Waktu dan Biaya Kegiatan Setiap Tahun

No	Kegiatan	Volume	Biaya Pelaksanaan setiap tahun (x Rp.1.000,00)					Jumlah (RP)	Alternatif Sumber Dana
			2014	2015	2016	2017	2018		
A	Pemulihan Hutan dan Lahan								
1	Pembuatan Hutan Rakyat	3.075,54	3.492.914	3.299.103	1.281.278	-	-	8.073.295	DAK Bidang Kehutanan/APBN
2	Pengkayaan Hutan Rakyat	3.594,88	-	-	1.208.216	1.651.933	1.615.476	4.475.626	DAK Bidang Kehutanan/APBN
B	Pengendalian Erosi dan Sedimentasi								
1	Gully Plug	97	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	485.000	DAK Bidang Kehutanan/APBN
2	Dam Penahan	26	145.932	121.610	121.610	121.610	121.610	632.372	DAK Bidang Kehutanan/APBN
3	Dam Pengendali	9	337.150	337.150	337.150	337.150	168.575	1.517.175	DAK Bidang Kehutanan/APBN
4	Pembuatan Teras/SPA/Rorak	4.760,43	1.183.048	1.158.551	1.173.843	1.209.600	1.225.498	5.950.539	APBN
C	Pengembangan Sumberdaya Air								
1	Perlindungan Mata Air	162,55/52	85.965	78.150	85.965	78.150	78.150	406.380	APBD Kabupaten
2	Sumur Resap	27	21.960	21.960	18.300	18.300	18.300	98.820	DAK Bidang Kehutanan/APBN

No	Kegiatan	Volume	Biaya Pelaksanaan setiap tahun (x Rp.1.000,00)					Jumlah (RP)	Alternatif Sumber Dana
D	Pengembangan Kelembagaan								
1	Pelatihan Kelompok Tani	4 Angk/th	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	100.000	APBD Kabupaten/APBN
2	Peningkatan Kapasitas SDM Kehutanan	10 Org/th	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	50.000	APBD Kabupaten/APBN
3	Penyuluhan Kehutanan	Seluruh Wilayah Binaan	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	150.000	DAK Bidang Kehutanan/APBD
	Jumlah		5.666.969	5.416.524	4.621.362	3.811.743	3.622.608	23.139.206	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN